

**ALIH KELOLA LAHAN OBYEK PROGRAM PHBM
DI LMDH RIMBA MAKMUR**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama
Sosiologi Pembangunan

Oleh :

Bayu Teguh Pambudi

145120100111018



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ALIH KELOLA LAHAN OBYEK PROGRAM PHBM

DI LMDH RIMBA MAKMUR

SKRIPSI

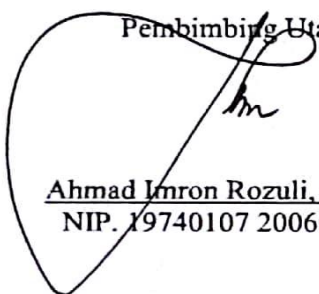
Disusun Oleh

Bayu Teguh Pambudi

NIM 145120100111018

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama



Ahmad Imron Rozuli, SE., M.Si
NIP. 19740107 200601 1 001

Pembimbing Pendamping



Anik Susanti, S.Pd., M.Si
NIK. 20140586 09161 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi



Ami Fatma Chawwa, M.Si., Ph.D
NIP. 197403082005012001

LEMBAR PENGESAHAN

ALIH KELOLA LAHAN OBYEK PROGRAM PHBM

DI LMDH RIMBA MAKMUR

SKRIPSI

Disusun Oleh

Bayu Teguh Pambudi

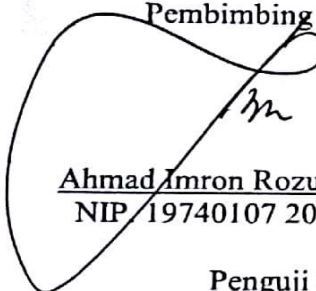
NIM 145120100111018

Telah diujikan dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana

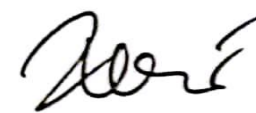
Pada tanggal 12 Desember 2018

Tim Penguji


Pembimbing Utama


Ahmad Imron Rozuli, SE., M.Si
NIP. 19740107 200601 1 001


Pembimbing Pendamping


Anik Susanti, S.Pd., M.Si
NIK. 20140586 09161 2 001



Penguji I


Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS
NIP. 19480419 197412 1 001

Penguji II


Ucca Arawindha, S.Sos., MA
NIK. 20130687 1118 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Indigdo, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19690814 199402 1 001

PERNYATAAN

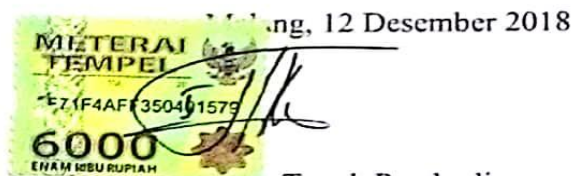
Yang Bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama : Bayu Teguh Pambudi

NIM : 145120100111018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Alih Kelola Lahan Obyek Program Phbm Di LMDH Rimba Makmur** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.



Bayu Teguh Pambudi
NIM. 145120100111018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenannya laporan penelitian skripsi dengan judul “*Alih Kelola Lahan Program Phbm Di Lmdh Rimba Makmur*” dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Penulis tidak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi yang dituliskan penulis. Atas berbagai masukan dan dukungan penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang selalu diberikan demi kelancaran penyusunan skripsi.
2. Bapak Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran selama proses bimbingan berlangsung, serta sangat membantu dalam isi penyusunan penulisan skripsi.
3. Ibu Anik Susanti, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran selama proses bimbingan skripsi berlangsung, serta sangat sabar membantu kekurangan kepenulisan terkait masalah redaksi penulisan sejak awal bimbingan.
4. Pihak narasumber yang telah membantu memberikan keterangan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Rekan-rekan jurusan sosiologi yang telah bersama selama perkuliahan dan menjadi keluarga.

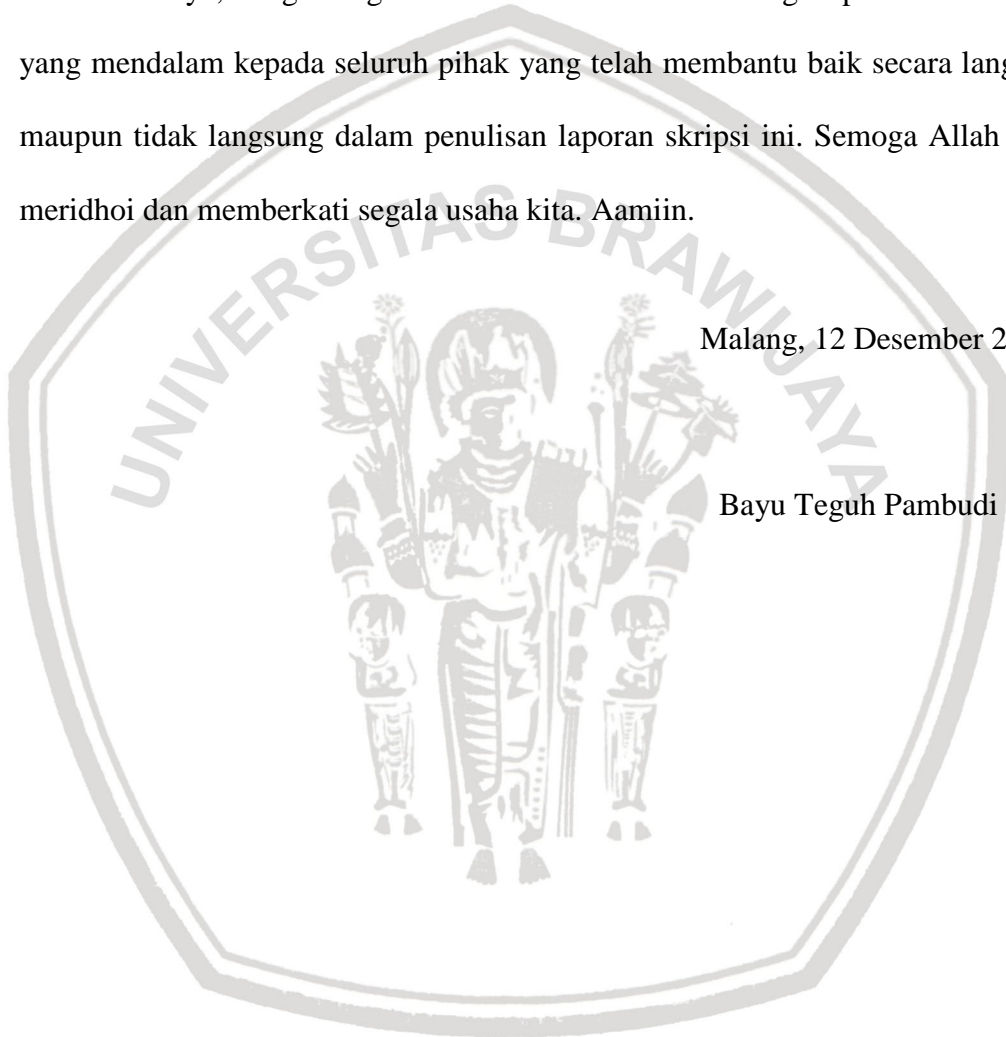
6. Hafida Ilhami yang selalu memberi motivasi dan mau menjadi teman diskusi baik tentang skripsi maupun masalah lain-lain.

7. Dameria Rosalin, Rony Wahyu, Rizky Bima, Rory, Mohamad Abdulloh, Luhur Suseno, Regino, Hasna, Riska dan teman-teman lain yang sudah memberikan dukungan moril dan diskusi dalam penyusunan skripsi kali ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan laporan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberkati segala usaha kita. Aamiin.

Malang, 12 Desember 2018

Bayu Teguh Pambudi



ABSTRACT

Bayu Teguh Pambudi. (2018). Department of Sociology. Faculty of Social and Political Sciences. University of Brawijaya. The Shifting Management of Object Land of PHBM Program in LMDH Rimba Makmur. Supervisors: Ahmad Imron Rozuli and Anik Susanti.

The action of shifting management of object land of PHBM program which conducted by the members of LMDH Rimba Makmur and substitute farmers involved the resources that owned by each actor and various interests underlying the actions of land management. The study aimed to examine the reason and process of shifting management that conducted by the farmers who released and recipients of management rights and to understand the impact of post-shifting management. The data analysis of this study was using Rational Choice analysis of James Coleman. Rational Choice Analysis explained that each actor's action was an effort to maximize profits or achieve goals by using the resources they had. This study used qualitative method with descriptive design. The technique of collecting data was conducted through observation, interviews and documentation.

The results of this study indicated that the members of LMDH was just knew about the profit sharing system and not all of members got the are from land clearing but also from inheritance and substitute manager of the land. Farmers who involved in land management were driven by urgent family needs and the decrement of land productivity. The action which carried out by the farmers who the members of LMDH was rational action to achieve the goal of meeting family needs and investment by using resources in the form of land in PHBM program. The process of management was carried out by utilizing social networks, information, material capital and social capital owned by each actor. The impact of land management did not have significant impact on the family economy of the sharecropper.

Keywords: Shifting Land Management, Rational Choice, PHBM

ABSTRAK

Bayu Teguh Pambudi. (2018). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang. Alih kelola Lahan Obyek Program PHBM Di LMDH Rimba Makmur. Pembimbing Ahmad Imron Rozuli dan Anik Susanti.

Tindakan alih kelola lahan obyek program PHBM yang dilakukan antara anggota LMDH Rimba Makmur dan petani pengganti melibatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor dan berbagai kepentingan yang melatarbelakangi tindakan alih kelola lahan. Tujuan dari penelitian ini mengkaji tentang alasan dan proses alih kelola yang dilakukan oleh petani pelepas dan penerima hak kelola serta melihat dampak pasca alih kelola. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Pilihan Rasional dari James Coleman. Analisis Pilihan Rasional menerangkan bahwa setiap tindakan aktor merupakan upaya untuk memaksimalkan keuntungan atau mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggota LMDH baru mengetahui sistem bagi hasil dan tidak semua anggota mendapatkan lahan hasil pembukaan lahan melainkan juga dari hasil warisan dan pengelola pengganti. Petani yang terlibat alih kelola lahan didorong oleh faktor kebutuhan keluarga yang mendesak dan menurunnya produktivitas lahan. Tindakan yang dilakukan oleh petani anggota LMDH merupakan tindakan rasional untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan keluarga dan investasi dengan menggunakan sumber daya berupa lahan program PHBM. Proses alih kelola dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial, informasi, modal materi dan modal sosial yang dimiliki masing-masing aktor. Dampak alih kelola lahan tidak berdampak signifikan kepada perekonomian keluarga petani penggarap.

Kata Kunci: Alih Kelola lahan, Pilihan Rasional, PHBM

DAFTAR ISI

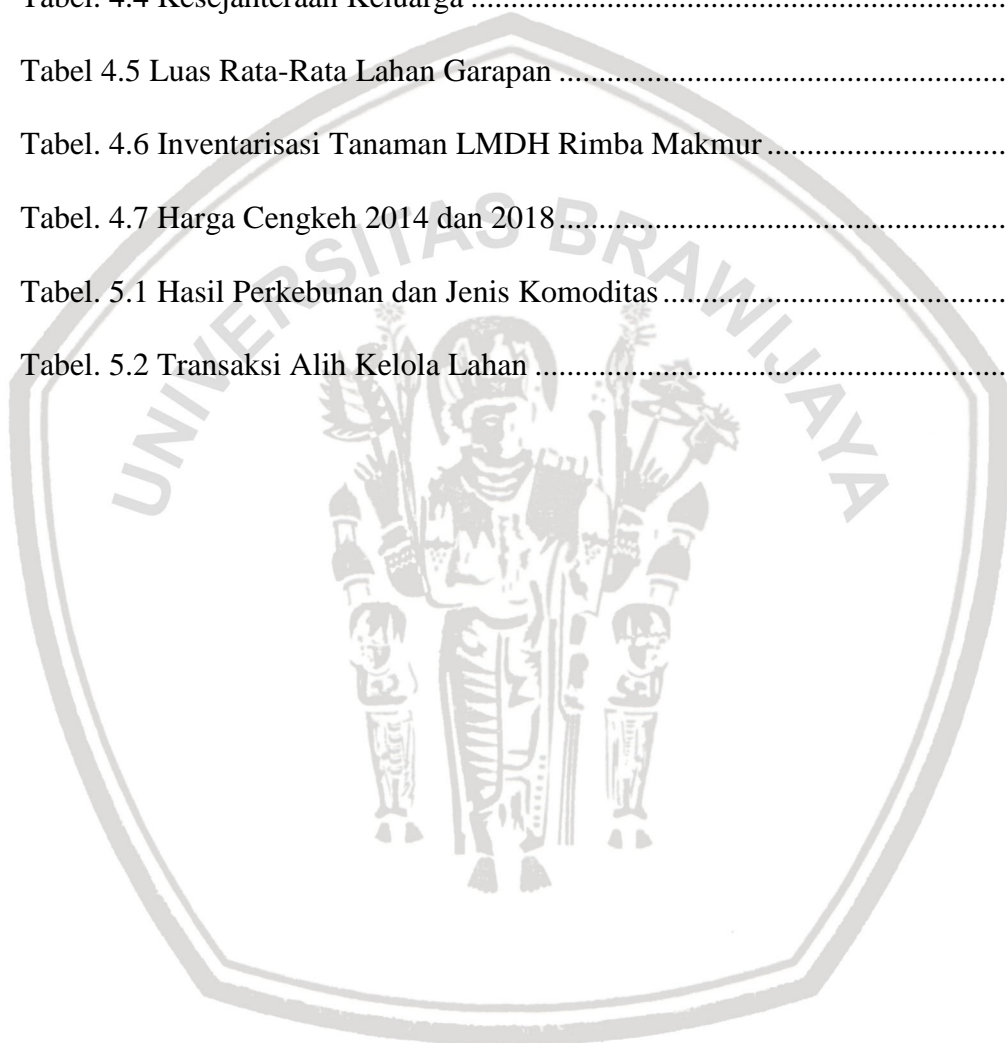
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Teori Pilihan Rasional James S. Coleman.....	13
2.3 Definisi Konseptual	20
2.3.1 Alih kelola	20

2.3.2	PHBM dan LMDH	20
2.3.3	Dampak.....	23
2.3.4	Petani Pesanggem.....	24
2.3.5	Petani Pengalih dan Petani Pengganti	24
2.4	Alur Berfikir.....	25
BAB III.....		30
METODE PENELITIAN		30
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
3.2	Fokus Penelitian.....	31
3.3	Lokasi Penelitian.....	31
3.4	Sumber Data.....	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6	Teknik Penentuan Informan.....	35
3.7	Teknik Analisis Data.....	36
3.8	Teknik Keabsahan Data	37
BAB IV		39
GAMBARAN UMUM		39
4.1	Kecamatan Munjungan	39
4.2	Gambaran Umum Desa Tawing.....	42
4.2.1	Keadaan Geografis Tempat Penelitian	42
4.2.2	Kondisi Penduduk	44
4.2.3	Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Tawing.....	47
4.2	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).....	49

4.2.1.	Sejarah dan Kondisi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	
	Rimba Makmur.....	49
4.3	Gambaran Informan	60
BAB V.....		63
PEMBAHASAN		63
5.1	Cara Mendapatkan Lahan Dan Dampak PHBM Pada LMDH Rimba	
	Makmur.....	63
5.2	Alih kelola lahan PHBM dalam Perspektif James Coleman	68
5.3	Alternatif Meminimalisir Alih Kelola Lahan	87
BAB VI.....		94
KESIMPULAN DAN SARAN		94
6.1	Kesimpulan	94
6.2	Saran	95
6.2.1	Saran Praktis.....	95
6.2.2	Saran Akademis.....	97
DAFTAR PUSATAKA		xii
Lapiran. 1 Panduan Guide Interview		xv

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Perbandingan Penelitian.....	12
Tabel. 4.1 Jenis dan Luas Tanah Di Kecamatan Munjungan.....	40
Tabel. 4.2 Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaanya	43
Tabel. 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tawing	45
Tabel. 4.4 Kesejahteraan Keluarga	47
Tabel 4.5 Luas Rata-Rata Lahan Garapan	56
Tabel. 4.6 Inventarisasi Tanaman LMDH Rimba Makmur	57
Tabel. 4.7 Harga Cengkeh 2014 dan 2018.....	57
Tabel. 5.1 Hasil Perkebunan dan Jenis Komoditas	67
Tabel. 5.2 Transaksi Alih Kelola Lahan	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Berfikir.....	25
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Munjungan.....	39
Gambar 4.2 Peta Desa Tawing.....	42
Gambar 4.3 Peta Desa Tawing dan Lahan LMDH Rimba Makmur.....	49
Gambar 5.1 Proses Transaksi Alih Kelola Lahan Obyek PHBM Antara Pak WD dan Pak Bonijo	69
Gambar 5.2 Lokasi Alih Kelola Lahan Pak WD.....	72
Gambar 5.3 Proses alih kelola lahan yang dilakukan oleh Pak MR dan Pak Sutikno	72
Gambar 5.4 Lokasi Lahan Alih Kelola Pak MJ	77
Gambar 5.6 Tagihan <i>Sharing</i> buah	82

BAB I

PENDAHULUAAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pengelolaan hutan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang bergantung pada sumber pendapatan dari hasil hutan. Saat ini, Pulau Jawa memiliki luas kawasan hutan 3.040.457,97 ha. Pada penerapannya 2.400.000 ha dikelola oleh Perum Perhutani sebagai Badan Usahan Miliki Negara (BUMN) dan sisanya ditetapkan sebagai kawasan konservasi (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa petani sekitar hutanlah yang paling dirugikan.

Pengelolaan hutan yang tidak mengakomodasi kepentingan petani sekitar hutan justru mengarah pada peminggiran akses masyarakat petani terhadap sumber daya hutan. Dampak dari pembatasan tersebut tidak jarang menyebabkan kemiskinan di masyarakat sekitar hutan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 merilis data indeks rasio gini di Pulau Jawa berkisar 0,37 sampai 0,42. Lebih lanjut, provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk dengan pendapatan terendah di Indonesia sebanyak 4.775.000 jiwa, angka tersebut merupakan angka pendapatan terendah di Indonesia. Selain itu, terdapat 32 ribu desa yang berstatus definitif berada pada kawasan hutan (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2017).

Sebelum beranjak lebih jauh, permasalahan pengelolaan lahan hutan menjadi masalah yang hampir tidak ada habisnya. Pemerintahan Orde Baru membuat sistem pengelolaan hutan dengan paradigma ekonomi kehutanan melalui penerjemahan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal tersebut berbunyi “bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerjemahan undang-undang versi Orde Baru itulah yang membuat kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia menjadi sentralistik. Alur piramida intruksi sentralistik pengelolaan hutan di Pulau Jawa dimulai dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia sampai pada Perum Perhutani selaku pemegang hak kelola hutan di Pulau Jawa. Akibat dari penerapan pengelolaan hutan yang sentralistik membuat kebijakan yang diterapkan Perhutani untuk mengamankan hutan dari masyarakat bersifat represif (Subadi, 2005).

Adanya ketidakadilan dalam pengelolaan lahan hutan dan ketidakstabilan pemerintahan pada masa gerakan reformasi membuat masyarakat melakukan penebangan hutan yang dikelola Perhutani secara masal dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan keluarga. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sekitar hutan melihat nilai ekonomi dari hasil hutan. Pada waktu Orde Baru, masyarakat tidak bisa mengakses hutan karena Perhutani menerapkan kebijakan yang bersifat sentralistik dan represif kepada masyarakat atas sumber daya hutan.

Degradasi lahan akibat penebangan hutan yang dilakukan masyarakat sekitar hutan membuat pemerintah sadar bahwa kebijakan sentalistik dan refresif yang dilakukan kepada masyarakat tidak sesuai lagi untuk dilanjutkan. Maka diperlukan kebijakan yang bisa menaungi kepentingan masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Paradigma yang dikedepankan dalam regulasi ini adalah keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Menindaklanjuti regulasi tersebut, Perhutani mengeluarkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai jawaban atas pengelolaan hutan yang kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk mengelola hutan. Pada penelitian ini program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat akan disebut dengan istilah program PHBM. Program PHBM bertujuan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal untuk bisa mengelola hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat tidak hanya menjadi obyek kebijakan melainkan menjadi subyek dari program. Selain itu, tujuan program PHBM dapat menciptakan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam program antara lain swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi atau lembaga penelitian dan masyarakat sendiri. Perlu ditekankan bahwa posisi masyarakat menjadi prioritas dan pihak-pihak lain cenderung sebagai fasilitator, pendukung, dan pembimbing masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya.

Program PHBM diimplementasikan sejak tahun 2001, dengan luas wilayah sebesar 2.445.006 ha. Untuk mendapat hak konsesi di areal Perhutani masyarakat harus mempunyai organisasi yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Istilah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pada penelitian ini akan disebut LMDH. Dikutip dari laman www.perhutani.co.id yang diakses Senin (20/12/2017), tercatat pada Tahun 2015, terdapat 5.390 unit LMDH dengan jumlah 1,17 juta kepala keluarga. Jumlah tersebut disesuaikan dengan luas lahan yang dialokasikan kepada anggota LMDH yakni 2.405.767 Ha (Perhutani, 2017).

Salah satu lokasi Program PHBM adalah Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang merupakan salah satu wilayah pangkuan Perhutani KPH Kediri. Sejarah panjang tentang sistem pengelolaan hutan di Kecamatan Munjungan tidak lepas dengan peralihan rezim negara ini. Pada waktu Orde Baru, masyarakat dilarang mengelola hutan dan mengambil hasil hutan. Setiap warga yang melakukan pembalakan akan ditangkap polisi hutan dan diadili. Dari adanya kebijakan tersebut, masyarakat tidak berani melakukan aktivitas di lahan negara.

Namun, sejak era reformasi terlebih dengan adanya program PHBM, masyarakat diajak bekerja sama melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Pengelolaan lestari berguna untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan pendapatan keluarga petani. Hal tersebut berbeda dengan pengelolaan hutan pada masa Orde Baru dan awal reformasi karena pada waktu itu masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan hutan dan sumber daya hutan dikuasai negara (Rachman, 2012: 41-43). Kerja sama dalam pengelolaan hutan yang dilakukan Perhutani juga berfungsi sebagai rekonsiliasi konflik dan pengamanan hutan. Pada gilirannya, hal tersebut memberi justifikasi kepada Perhutani untuk merealisasikan program PHBM. Salah satu lembaga yang mengikuti program PHBM adalah LMDH Rimba Makmur.

Selanjutnya, pendistribusian lahan dilakukan oleh Perhutani bersama regu LMDH kepada masyarakat yang menjadi anggota. Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) tiga LMDH Rimba Makmur Desa Tawing, proporsi bagi hasil dalam sistem kemitraan sebesar 60%:40%, dengan rincian 60% untuk masyarakat penggarap dan 40% untuk Perhutani. Pengambilan bagi hasil dilakukan pada saat musim panen

tiba, melalui Ketua Pokja masing-masing petak dan dikumpulkan di LMDH Rimba Makmur.

Masyarakat mendapat akses untuk mengelola lahan secara legal pada tahun 2006 dan masyarakat bisa memperpanjang perjanjian setiap 5 tahunnya. Ada hal yang menarik dalam program pemberdayaan PHBM bahwa ada masyarakat anggota LMDH Rimba Makmur yang melakukan tindakan alih kelola lahan konsesi, seperti Pak MJ, Pak WD, Pak MR. Bagi petani yang mengalih kelolakan lahannya, mereka kehilangan akses atas sumber daya lahan hutan yang dimilikinya. Dari observasi awal yang dilakukan peneliti pada tahun 2017 terdapat masyarakat pemilik baru yang memiliki lahan konsesi dari tindakan alih kelola lahan, seperti Pak Agus, Munakib dan Sumar. Dari aspek sosial, pengelola pengganti berasal dari kelas menengah ke atas yang bukan sasaran program.

Pada waktu observasi yang sama seperti di paragraf sebelumnya, ditemukan 4 kepala keluarga yang kehilangan hak kelola lahan program PHBM akibat dari tindakan alih kelola yang dilakukannya. Petani yang kehilangan hak kelola tersesebut, seperti Pak Samingan, Mbah Sukirah, Pak Pair dan Pak Tupani. Masyarakat yang mengalih kelola sebagian berasal dari strata bawah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fokus utama penelitian ini adalah tindakan alih kelola lahan obyek program PHBM pada LMDH Rimba Makmur. Selain itu, peneliti sekaligus melihat dampak pasca alih kelola terhadap pendapatan ekonomi keluarga.

Penelitian tentang alih kelola lahan konsesi Perhutani pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian *pertama* dilakukan oleh Muhaimin (2014) yang

menyatakan bahwa praktik jual-beli lahan Perhutani Cilacap, secara perspektif hukum Islam tidak sah dan penuh spekulasi. Dengan alasan tindakan jual beli lahan yang dilakukan mengandung resiko untuk kedua pihak yang terlibat, karena lahan yang dipertukaarkan bukan hak milik pribadi, melainkan lahan yang berstatus milik Perhutani.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mudlofar (2012) tentang jual beli lahan Perhutani Banyuwangi yang dilakukan penggarap tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada pada Al-Quran dan Sunnah yakni bersifat bathil dan fasid. Mudlofar juga melihat tindakan jual beli dari sudut pandang hukum Islam dan cara masyarakat melakukan praktik jual beli, tetapi lebih menekankan pada aspek hukum Islam Jual beli.

Maka dari observasi dan pengkajian yang dilakukan peneliti menyakatakan bahwa tindakan alih kelola lahan yang dilakukan oleh sebagian anggota LMDH Rimba Makmur tidak dapat dikatakan melanggar kesepakatan antara masyarakat dan Perhutani. Kesepakatan yang dimaksud adalah tidak memperjualbelikan lahan obyek program PHBM, karena masyarakat mengistilahkan tindakan tersebut dengan istilah alih kelola dengan ganti rugi dan tindakan alih kelola lahan tersebut melanggar syariat Islam menurut penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Meskipun pembahasan tentang alih kelola lahan milik Perhutani bukan yang pertama. Namun, fenomena ini penting untuk dilakukan pengkajian karena aktor pengalih maupun pengganti sama-sama memiliki resiko. Petani pengalih memiliki resiko akan kehilangan akses pada pengelolaan hutan program PHBM yang berimplikasi pada pekerjaan, sumber pendapatan keluarga dan asset keluarga yang

secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan keluarga. Sedangkan resiko dari petani pengganti yaitu lahan yang didapat dari tindakan alih kelola bersatatus bukan hak milik pribadi melainkan lahan milik negara yang dikelola Perhutani dan tidak adanya perjanjian tertulis pada saat transaksi antara petani pengalih dan pengganti pengganti juga beresiko sengketa tentang status pengelolaan lahan dikemudian hari. Potensi sengketa tidak hanya antara petani pengalih dan petani pengganti melainkan dengan pihak Perhutani selaku pengelola yang sah.

Adanya resiko dari transaksi alih kelola lahan program PHBM yang dilakukan oleh aktor petani pengalih dan petani pengganti, perlu dilakukan pengkajian tentang sebab dan pertimbangan-pertimbangan apa yang dilakukan aktor petani dalam menentukan keputusan mengalih kelolakan lahan maupun mengganti pengelolaan lahan program PHBM. Mengingat pada setiap tindakan yang dilakukan individu dipengaruhi oleh rasionalitas individu maupun lingkungan sosialnya. Selain itu, sesuai yang sampaikan oleh James Coleman bahwa setiap tindakan yang dilakukan individu merupakan implementasi dari keputusan rasional untuk tujuan memaksimalkan keuntungan (Coleman, 2011: 36-37).

Pada dasarnya tidak semua aktor penggarap memiliki sumber daya yang menjadi kepentinganya, maka diperlukan transaksi sumber daya dengan aktor lain. Adanya pertukaran sumber daya oleh petani pengalih dan petani pengganti sebagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, dengan berpijak pada pengkajian yang pernah dilakukan, peneliti akan menyumbangkan kajian tentang rasionalitas petani anggota LMDH Rimba Makmur

untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan tindakan alih kelola lahan program PHBM yang terdapat resiko di dalamnya. Rasionalitas petani dapat diketahui melalui alasan munculnya keputusan dan cara petani penggarap melakukan alih kelola lahan. Jika transaksi alih kelola lahan biasanya melibatkan lahan hak milik pribadi, tetapi dalam fenomena ini melibatkan lahan milik Perhutani.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dan mengapa petani pengelola lahan melakukan tindakan alih kelola lahan obyek program PHBM di LMDH Rimba Makmur?
2. Bagaimana dampak alih kelola lahan program PHBM yang dilakukan oleh anggota LMDH Rimba Makmur (petani pengalih)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas kemudian akan diuraikan mengenai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

- 1.3.1 Mendeskripsikan tindakan alih kelola lahan obyek program PHBM dilakukan oleh anggota LMDH Rimba Makmur.
- 1.3.2 Mendeskripsikan dampak alih kelola lahan obyek PHBM yang dilakukan oleh anggota LMDH Rimba Makmur.

1.4 Manfaat Penelitian

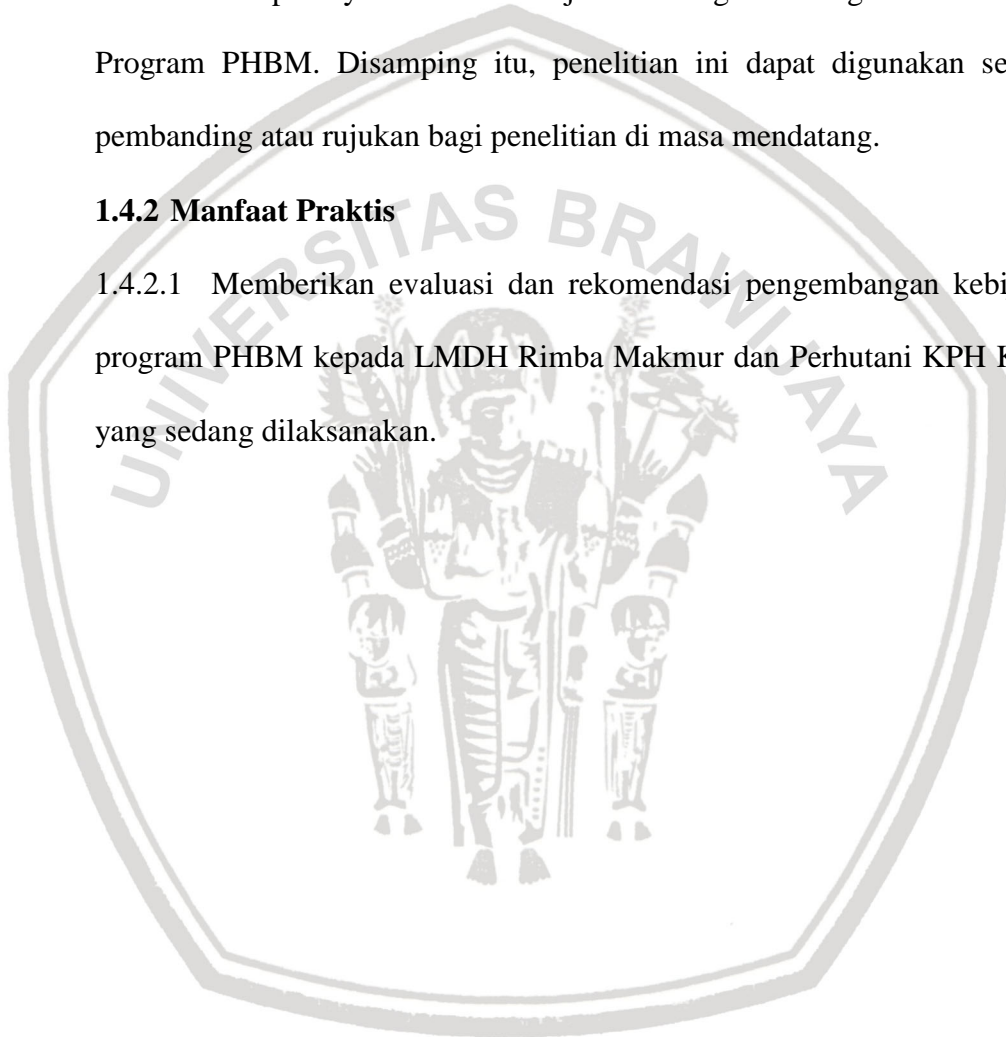
Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat bagi ranah akademis maupun ranah praktis. Peneliti akan menjelaskan mengenai manfaat ini berdasar kategori manfaat akademis dan praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

1.4.1.1 Memperkaya khasanah kajian tentang Sosiologi Ekonomi dan Program PHBM. Disamping itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan atau rujukan bagi penelitian di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Memberikan evaluasi dan rekomendasi pengembangan kebijakan program PHBM kepada LMDH Rimba Makmur dan Perhutani KPH Kediri yang sedang dilaksanakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, perbandingan dan rujukan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu penelitian terdahulu juga penting untuk memposisikan penelitian ini. Berikut penelitian yang terkait dengan praktik jual-beli hutan konsesi;

Penelitian *pertama*, dilakukan oleh Muhaimin, Tahun 2014 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap”* dengan hasil bahwa praktik jual beli lahan Perhutani tidak sesuai ketentuan syariat islam, karena obyek yang diperjual belikan menimbulkan kerawanan kerugian dikedua pihak dan penuh spekulasi. Tanah yang menjadi obyek tindakan hanya dapat diambil manfaatnya semata dan jual beli dilakukan secara lisan. Hal tersebut secara hukum islam bersifat *garar* (sesuatu yang belum memiliki kejelasan status). Serta, dari segi akad jual beli tersebut tidak mendapat pertimbangan dari pihak pemilik lahan yaitu Perhutani. Meski antara pelaku penggarap dan petani pembeli berlandaskan atas dasar kesukaan dan pertimbangan hasil manfaat lahan (Muhaimin, 2014).

Penelitian *kedua*, dilakukan oleh M Mudlofar pada Tahun 2012 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kedalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”* dengan hasil penelitian yang dilakukan tanah yang didistribusikan hanya untuk dikelola dengan harapan mendatangkan manfaat, bukan untuk dimiliki secara pribadi. Masyarakat petani yang dapat memanfaatkan adalah anggota LKMD. Dalam prosesnya

pemindahan hak kelola dilakukan dengan uang ganti rugi yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Serta Praktik tersebut telah melanggar syarat rukun islam karena masuk kategori fasid dan bathil. (Mudlofar, 2012).

Dari kedua penelitian diatas posisi penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “ *Alih Kelola Lahan Obyek Program PHBM di LMDH Rimba Makmur*” berbeda secara kajian, penelilitan ini menggunakan perspektif sosiologi ekonomi, sedangkan pada kedua penelitian diatas mengukan kajian hukum islam terhadap status tanah konsesi pemberdayaan Perhutani yang notabene berstatus bukan hak milik pribadi. Penelitian ini berposisi menguatkan penelitian sebelumnya yang mengambil perspektif hukum formal Islam. Maka penelitian ini ingin melihat bahwa ada pertimbangan-petimbangan yang mengandung resiko dari tindakan alih kelola lahan yang dilakukan oleh aktor petani pengalih maupun petani pengganti. Sebelum masuk dalam aksi alih kelola lahan petani, akan dilihat dahulu tentang dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan kepada penggarap dari PHBM. Dengan demikian nantinya akan diketahui dan mendeskripsikan latar belakang dampak sosial, sebab dan cara petani anggota LMDH melakukan alih kelola lahan obyek PHBM, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memberi rekomendasi kegiatan yang dapat meminimalisir aksi spekulatif jual beli lahan pemberdayaan Perhutani.

Tabel. 2.1 Perbandingan Penelitian

Peneliti	Muhaimin (2014)	M Mudlofar pada Tahun 2012
Judul	“Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tanah di lahan perhutani di Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap”.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kedalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.
Fokus	Meninjau Praktik Jual-Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap dengan perspektif hukum islam dan terjadinya praktik jual beli.	Melihat cara masyarakat memperjual belikan lahan perhutani di Desa Kendalrejo dan menganalisis dengan menggunakan hukum Islam
Hasil	Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat menggunakan cara lisan dengan dasar kesukaan dan manfaat. Serta ditinjau dari hukum islam tidak sesuai syarat jual beli karena masuk kategori garar (ketidakjelasan barang).	Aksi jual beli tidak sesuai syariat islam. Proses jual beli dilakukan dengan menggunakan uang ganti rugi. Tanah yang dipindah kelolakan tidak melibatkan perhutai selaku pemilik yang sah. Sedangkan menurut syarat rukun islam jual beli tindakan tersebut tidak sah karena bersifat fasid dan batil.

Sumber: Olah data pribadi

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Dalam pandangan Coleman, sosiologi harus berpusat pada sistem sosial yang ada dalam masyarakat, serta paradigma tindakan rasional merupakan teori yang menghasilkan integrasi paradigmatic yang beroperasi pada metodologi individualisme. Teori pilihan rasional melihat fenomena tingkat makro dengan perspektif mikro. Teori pilihan rasional menitik beratkan perhatiannya pada tingkat aktor. Dimana teori sosial bukan hanya sebagai latihan akademis semata, tetapi harus bisa berkontribusi pada perubahan sosial melalui intervensinya.

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindakan individu pasti memiliki sebuah pilihan dan orientasi. Setiap tindakan individu yang berbentuk keputusan pasti memiliki pertimbangan dan tujuan yang diinginkan. Dalam pengambilan tindakan atau keputusan, individu dipengaruhi oleh rasionalitas dari dalam dirinya dan lingkungan sosialnya (Haryanto, 2014: 25). James Coleman juga membahas tentang pilihan rasional individu, bahwa setiap pengambilan keputusan yang dilakukan individu pasti melibatkan pilihan-pilihan yang ada secara rasional yang berdampak terhadap perilaku aktor. Kondisi semacam ini juga terjadi pada pengelolaan hutan yang dilakukan oleh anggota LMDH Rimba Makmur yang memiliki hak kelola lahan obyek PHBM. Tetapi, sebagian anggota LMDH Rimba Makmur melakukan tindakan alih kelola lahan yang pada hakikatnya tindakan tersebut melanggar kesepakatan yang dilakukan antara LMDH dan Perhutani sebagai pemegang hak mengelola hutan. Tidak dapat dipungkiri terjadinya tindakan alih kelola lahan yang dilakukan anggota LMDH tidak lain juga melibatkan tindakan yang beralasan atau pilihan yang rasional.

Tindakan alih kelola yang dilakukan petani anggota LMDH bukanlah pilihan yang mudah untuk dipilih petani begitu saja. Hal ini karena petani yang dulunya dapat mengambil hasil dari lahan PHBM, ketika dialih kelolakan akan kehilangan akses untuk memanfaatkannya lagi. Begitu juga terjadi kepada petani pengganti, petani pengganti memiliki resiko karena lahan yang diterima atau yang dikelola tidak memiliki kepastian sebagai hak milik. Keputusan untuk alih kelola pasti mempertimbangkan manfaat atau hasil yang didapatkan masing-masing pihak dari tindakan alih kelola lahan, yang pada hakikatnya lahan hutan berstatus hak kelola bukan hak milik. Melakukan tindakan alih kelola merupakan salah satu tindakan yang memiliki alasan tersendiri bagi setiap aktor yang melakukannya.

Seringkali rasionalitas individu dipertanyakan oleh individu lain, karena keputusan yang diambil oleh individu dianggap tidak rasional oleh individu lain. Hal tersebut muncul karena terjadinya perbedaan pendapat dan tingkat rasionalitas antar individu. Maka dari situlah perlu melihat perspektif masing-masing individu dalam pengambilan keputusan yang dilakukannya, tentang rasional atau tidak rasional, karena setiap individu memiliki sudut pandang dan pengetahuan yang berbeda (Coleman, 2011: 21). Ketika melihat tindakan alih kelola yang dilakukan petani LMDH, ada sebagian petani dan masyarakat lain yang menganggap tindakan yang dilakukan anggota LMDH merupakan tindakan yang kurang rasional dan mengandung resiko.

Dalam jangka panjang, resiko bagi petani yang mengalih kelolakan lahan akan kehilangan salah satu mata pencariannya sehari-hari. Resiko serupa juga terjadi pada petani pengganti yaitu ketika Perhutani mengambil alih lahan yang dimilikinya, mereka tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki bukti

kepemilikan. Perbedaan pendapat inilah yang membuat adanya pernyataan rasional dan tidak rasional petani yang melakukan tindakan alih kelola lahan, tetapi tindakan tidak rasional adalah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh individu yang bersangkutan, karena pemikiranlah yang merupakan instrumen penentu pilihan paling rasional menurut diri sendiri.

Individu dalam menentukan pilihan rasionalnya, ada element yang perlu dilibatkan. Ada dua bagian penting dari teori pilihan rasional yaitu pelaku/aktor dan benda/ sumber daya, dimana keterkaitan antara keduanya adalah kuasa/kontrol dan kepentingan (Coleman, 2011: 36-37). Menurut Coleman, sumber daya adalah semua potensi atau hal-hal yang dapat di kontrol oleh aktor, menarik perhatian dan mereka berkepentingan kepadanya. Sedangkan aktor adalah individu yang memiliki tujuan dan kekuatan untuk menentukan pilihan dan tindakannya (Ritzer, 2012: 760-761). Dalam hal ini sumber daya yang digunakan aktor adalah lahan obyek PHBM, materi berupa uang, modal sosial (jaringan). Sumber daya yang dikelola oleh aktor digunakan untuk mewujudkan keinginannya melalui seleksi pengambilan keputusan secara rasional.

Pilihan rasional menitik beratkan pada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam permasalahan alih kelola lahan yang dilakukan petani anggota LMDH terhadap lahan obyek PHBM memiliki alasan atas tujuan dan tindakannya. Individu dalam hidupnya sering memiliki pilihan-pilihan yang dipengaruhi oleh rasionalitas dan lingkungannya. Ukuran rasionalitas bersifat bebas bagi individu. Begitu juga yang terjadi kepada petani anggota LMDH, adanya tindakan alih kelola yang dilakukan oleh petani merupakan upaya kedua belah

pihak untuk mewujudkan kepentingannya yaitu pemenuhan kebutuhan keluarga, melalui transaksi alih kelola.

Bagi Coleman (2011: 42) yang menjadi sebuah sistem sosial adalah sekumpulan individu yang menerapkan kuasanya untuk merealisasikan kepentingannya. Kategori jenis tindakan yang relevan dengan alih kelola yang dilakukan anggota LMDH adalah jenis struktur tindakan besar. Jenis struktur tindakan besar merupakan perilaku individu dengan menggunakan asset sumber daya yang dimilikinya, dengan melakukan tukar kuasa atas benda yang kurang menjadi kepentingannya dengan sumber daya yang dianggap menjadi kepentingannya. Proses ini merupakan upaya aktor untuk memaksimalkan/ merealisasikan tujuannya/ kepentingan dengan cara menguasai sumber daya. Tetapi yang terjadi pada tindakan alih kelola yang dilakukan anggota LMDH, dalam prosesnya petani secara sadar tidak mampu mencukupi kebutuhannya dari bertanam. Maka, dengan cara melakukan tindakan alih kelola petani dapat memenuhi kebutuhannya, hal sebaliknya terjadi kepada aktor yang mengganti. Deferensiasi dan stratifikasi yang terjadi dan dilakukan oleh aktor-aktor dalam alih kelola obyek PHBM menunjukkan berjalan kepada arah yang sama yaitu untuk mencapai tujuannya atau memenuhi kebutuhan hidup.

Selanjutnya aktor alih kelola lahan obyek PHBM dalam tindakannya dibatasi oleh norma/aturan yang berlaku yaitu larangan alih kelola. Namun dalam kondisi terdesak oleh kebutuhan sehari-hari dalam jumlah nominal banyak, seperti bangun rumah, beli motor, beli mobil, anak sekolah dan lain-lain. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan ketika dalam jangka waktu singkat membutuhkan materi untuk memenuhi kebutuhan, salah satu langkah praktis yang dapat diambil petani

adalah mengalih kelolakan lahan yang dimilikinya. Sehingga faktor situasional sangat menentukan dalam tindakan alih kelola lahan.

Faktor situasi dan kondisi menjadi faktor yang mendorong petani melakukan tindakan alih kelola lahan dan menentukan pilihan rasional yang diambil oleh petani anggota LMDH. Lebih jelasnya petani dihadapkan pada kondisi untuk mengambil keputusan, seperti untuk bangun rumah, pada kondisi ini petani memiliki pilihan sebagai berikut:

1. Mendapatkan uang tanpa menjual lahan, dengan resiko berhutang, dengan tidak dapat uang dalam jumlah banyak untuk bangun rumah.
2. Menjual lahan dengan keuntungan dapat uang cepat tanpa berhutang dengan jumlah yang besar.
3. Tidak menjual lahan dan tidak bisa bangun rumah dalam jangka waktu dekat.

Berdasarkan kondisi diatas, maka aktor (petani) akan memilih dan memutuskan yang mereka percaya dan benar-benar mereka buuhkan saat itu. Maka keputusan nomer 2 yakni menjual lahan dengan mendapat uang cepat dan dalam jumlah besar. Hal tersebut dipilih karena sudah mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi.

Salah satu fenomena tingkat makro yang dibahas adalah perilaku kolektif. Menurut Coleman perilaku kolektif adalah perilaku rasional yang menghubungkan antara fenomena mikro dan makro, artinya bagaimana tindakan individu berimplikasi pada perilaku sistem. Inti dari gerakan kolektif ini adalah pengakuan atas hak dan wewenang yang dimiliki individu kepada individu lain. Pengakuan hak dan wewenang tersebut merupakan pendistribusian kendali tindakan individu

secara rasional terhadap individu lain, yang dilakukan secara sepihak, bukan termasuk pertukaran. (Ritzer, 2012: 763-764). Perilaku kolektif yang sering terjadi pada umumnya sebagai berikut (Coleman, 2011: 271-272):

1. Tindakan yang dilakukan sekelompok individu dalam waktu yang bersamaan.
2. Kegiatan yang bersifat sementara, dinamis dalam kondisi tidak stabil.
3. Adanya keterlekatan sesama individu yang melakukan aksi kolektif.

Maka tindakan kolektif terjadi karena adanya upaya aktor untuk mencapai tujuannya melalui penyerahan hak kuasa kepada individu lain, melalui eksternalisasi dan internalisasi secara seimbang, dan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, tindakan kolektif yang dianggap sebagai upaya memaksimalkan keuntungan tidak selalu menyebabkan keseimbangan dalam sistem.

Seperti yang terjadi dalam alih kelola lahan oleh petani LMDH Rimba Makmur terdapat sistem sosial dalam melakukan tindakan alih kelola. Alih kelola lahan menjadi sebuah tindakan kolektif yang dilakukan petani anggota LMDH. Petani melakukan pengalihan kontrol atas tindakannya kepada petani lain yang melakukan alih kelola lahan sebelumnya atau melihat perilaku pihak lain. Tindakan pengalihan kontrol tersebut dilakukan dalam kondisi sadar bukan dalam kondisi reaktif. Tindakan yang dilakukan petani anggota LMDH yang tergolong dalam perilaku kolektif ini karena adanya penyerahan kontrol atas tindakannya yang melihat kondisi masyarakat disekitarnya/anggota LMDH yang melakukan alih kelola lahan untuk mencukupi kebutuhannya secara cepat (Coleman, 2011: 271-

277). Sehingga tindakan awal menentukan tindakan yang berbeda pada akhirnya, inilah yang dikatakan tidak dapat diprediksi dan tidak stabil.

Gejala makro yang menjadi kajian Coleman selain tindakan kolektif adalah norma. Norma dianggap dapat digunakan untuk menerangkan perilaku individu dalam tindakannya. Namun sebagian sosilog tidak menerangkan alasan dan proses norma itu muncul. Berangkat dari hal tersebut Coleman berupaya menjelaskan tentang kemunculan norma dan dipertahankan oleh aktor rasional. Norma sosial dikaji untuk menentukan tindakan benar dan salah oleh sekelompok individu (Coleman, 2011: 333). Menurutnya, norma-norma muncul dan dipertahankan oleh masyarakat yang mendapat keuntungan dari kepatuhan dan kerugian atas pelanggaran yang dihasilkan dari ketaatan terhadap norma dan kerugian atas pelanggaran terhadap norma (Ritzer, 2012: 764).

Yang dimaksud norma adalah kewenangan yang dibuat melalui kesepakatan bersama dan digunakan untuk mengontrol perilaku individu. Pada dasarnya aturan yang baik hak kontrol dipegang oleh aktor/individu lain, bukan dipegang oleh pelaku yang bersangkutan. Selain itu, norma akan muncul ketika pelaku lain memegang hak yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil individu lain. Norma dapat lebih fundamental ketika individu sudah mengalami internalisasi dari norma, artinya individu mendapatkan keuntungan dari norma yang diterapkan tersebut (Coleman, 2011: 143-136). Dalam kasus alih kelola lahan obyek PHBM mengindikasikan bahwa norma formal yang bersal dari Perhutani tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut karena tidak terjadi proses internalisasi dalam anggota LMDH dan tidak terjadi distribusi hak kepada aktor lain (sesama anggota LMDH dan Perhutani) untuk tidak mengalih kelolakan lahan. Akan tetapi, hal sebaliknya

muncul norma dalam proses alih kelola, yaitu alih kelola yang dilakukan dibawah tangan (sepihak) oleh anggota LMDH. Hal tersebut menguatkan argumen Coleman (2011: 334) bahwa hak yang relevan bukan hak yang ditetapkan secara hukum atau formal oleh pelaku yang berwenang, melainkan hak yang dibuat dan sahkan secara sosial/konsensus atau informal.

Dengan menggunakan pilihan rasional dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penelitian ini dapat menggambarkan perilaku sistem yang dimuali dari unit analisis tingkat individu. Sehingga nanti mendapatkan deskripsi tentang tindakan alih kelola lahan obyek PHBM oleh petani anggota LMDH dengan unit rasionalitas tindakan tingkat individu, yang menimbulkan perilaku kolektif aktor-aktor dan sampai cara untuk mengontrol tindakan alih kelola yang berlangsung.

2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 Alih kelola

Alih kelola berasal dari kata yaitu alih dan kelola. Alih memiliki arti pindah, ganti, tukar dan ubah (KBBI, 2018a). Sedangkan, kelola adalah mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, memanfaatkan (KBBI, 2018). Maka definisi alih kelola adalah pengalihan pengendalian/pengelolaan, hak atas suatu benda atau sumberdaya antar satu pengurus/pengelola kepada pihak pengelola lain. Dalam penelitian alih kelola digunakan untuk mendefinisikan kegiatan pemindahan pengelolaan atas obyek lahan yang dilakukan oleh anggota LMDH. Dengan menggunakan uang sebagai bentuk ganti rugi.

2.3.2 PHBM dan LMDH

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah program pelibatan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk pengelolaan sumber daya hutan bersama

dengan pihak Perhutani. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menaungi kepentingan semua pihak untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan lestari dan inklusif. Pengembangan PHBM dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan hutan guna meningkatkan pendapatan keluarga petani. Serta pelibatan *stakeholder* lain untuk mendukung tujuan dari program PHBM sesuai kapasitas yang dimilikinya untuk mengelola hutan secara partisipatif, dengan prinsip keadilan, kebermanfaatan dan kelestarian tanpa merubah fungsi dan status hutan (Affianto, 2005).

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pertama kali dilakukan pada Tahun 2001, dengan memberi kesempatan masyarakat kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Saat ini, pedoman pelaksanaan program tersebut mengacu pada SK Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pelibatan masyarakat dan stakeholder dalam program PHBM dimaksudkan Perhutani untuk memanfaatkan semua sumber daya hutan yang dimiliki untuk menambah nilai tambah dari pengelolaan sumber daya hutan tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya hutan. Sistem penanaman yang sering dilakukan yang dilakukan menggunakan sistem tumpangsari, seperti menanam pisang, jagung, kopi diantara pohon pinus atau jati dan tanaman lain yang dapat meningkatkan pendapatan petani, selain dari bagi hasil tegakan. (Hairiah, Sardjono, & Sabarnurdin, 2003).

Supaya kegiatan PHBM dapat berjalan dengan baik dan lebih terkoordinir, maka masyarakat desa hutan perlu adanya wadah perkumpulan maka dibentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Menurut (Awang et al., 2008: 13) LMDH terdiri dari masyarakat yang menggantungkan pendapat keluarga pada sumber daya hutan dan memiliki kepedulian pada kelestarian hutan. Selain itu, lembaga ini dibentuk dan diinisiasi oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Perhutani selaku pemilik wilayah. LMDH dalam fungsinya memiliki kedudukan sejajar dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan, bukan sub unit dari Perhutani.

Dengan adanya program PHBM yang diinisiasi oleh Perum Perhutani, masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh manfaat secara ekonomi dari pengelolaan hutan yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Dalam kegiatan PHBM masyarakat memperoleh lahan untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berpedoman pada pengelolaan yang lestari. Selain itu, adanya kegiatan PHBM masyarakat petani hutan diberikan lahan oleh Perum Perhutani secara gratis untuk dikelola menjadi lahan pertanian dan sebagian hasilnya dimiliki oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil (*sharing*). Tetapi dalam pelaksanaan programnya masih terdapat kendala atau permasalahan salah satunya adalah alih kelola lahan oleh anggota LMDH kepada pihak lain, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak.

Menurut pengamatan peneliti, program PHBM yang dilakukan di Perhutani Pangkuan Munjungan Timur. Pada pola penanamannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat petani penggarap dengan sistem bagi hasil (*sharing*) antara petani dan Perhutani dengan tanaman komoditas kelapa, cengkeh, pisang dan lain-lain. Program PHBM tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial

petani penggarap dengan adanya pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari. Petani penggarap adalah orang menggarap tanah petani lain dengan hasil “bersih” yang hanya bisa digunakan untuk menyambung hidup. Selain itu, petani penggarap atau buruh tani; pria dan wanita dalam batas usia produktif (15-50 tahun) yang memiliki satu atau lebih wadah dari satuan usaha, tetapi karena hasilnya tidak cukup menunjang kebutuhan hidup keluarganya atau karena ingin menambah penghasilan dengan cara bekerja kepada petani lain. Petani yang memiliki lahan biasanya mulai memburuh setelah menggarap lahan miliknya sendiri (Jakasurya, 2017).

Pada pelaksanaannya terdapat tindakan alih kelola lahan yang dilakukan antar petani penggarap dan masyarakat lokal, yang berupa alih kelola lahan konsesi dari Perhutani. Tindakan alih kelola dilatarbelakangi oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga terdapat petani yang kehilangan akses pengelolaan sumber daya hutan pasca tindakan alih kelola lahan berlangsung.

2.3.3 Dampak

Pengertian dampak adalah pengaruh, benturan yang memberikan dampak, pengaruh atau perubahan (Soekanto, 2006: 429). Dari pengertian tersebut maka dampak dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu kejadian yang muncul karena adanya peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan menghasilkan positif atau negatif. Pengaruh positif berarti memberikan perubahan pada keadaan hidup yang lebih baik atau layak dari kondisi sebelumnya, begitupun sebaliknya. Program PHBM sedikit banyak memberikan dampak kepada masyarakat anggota LMDH Rimba Makmur. Dampak yang timbul meliputi dampak sosial ekonomi masyarakat anggota LMDH.

Sekilas tentang penjelasan sosial ekonomi, dalam kehidupan bermasyarakat kedua hal tersebut berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Singkatnya dampak sosial ekonomi merupakan segala sesuatu peristiwa atau fenomena yang timbul akibat adanya tindakan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan, baik primer, skunder dan tersier yang berakibat pada kondisi sosial. Pada penelitian ini, dampak ekonomi dari adanya pengelolaan lahan adalah peningkatan kebutuhan keluarga, lapangan kerja, meredanya konflik, dan alih kelola lahan. Alih kelola lahan dilakukan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga yang tidak cukup dipenuhi dari hasil pengelolaan lahan, maka terjadilah alih kelola lahan. Sekaligus alih kelola memberikan dampak positif bagi keluarga yang bisa menggunakannya untuk investasi ke sektor produktif, meskipun harus kehilangan asset lahan, begitu juga sebaliknya.

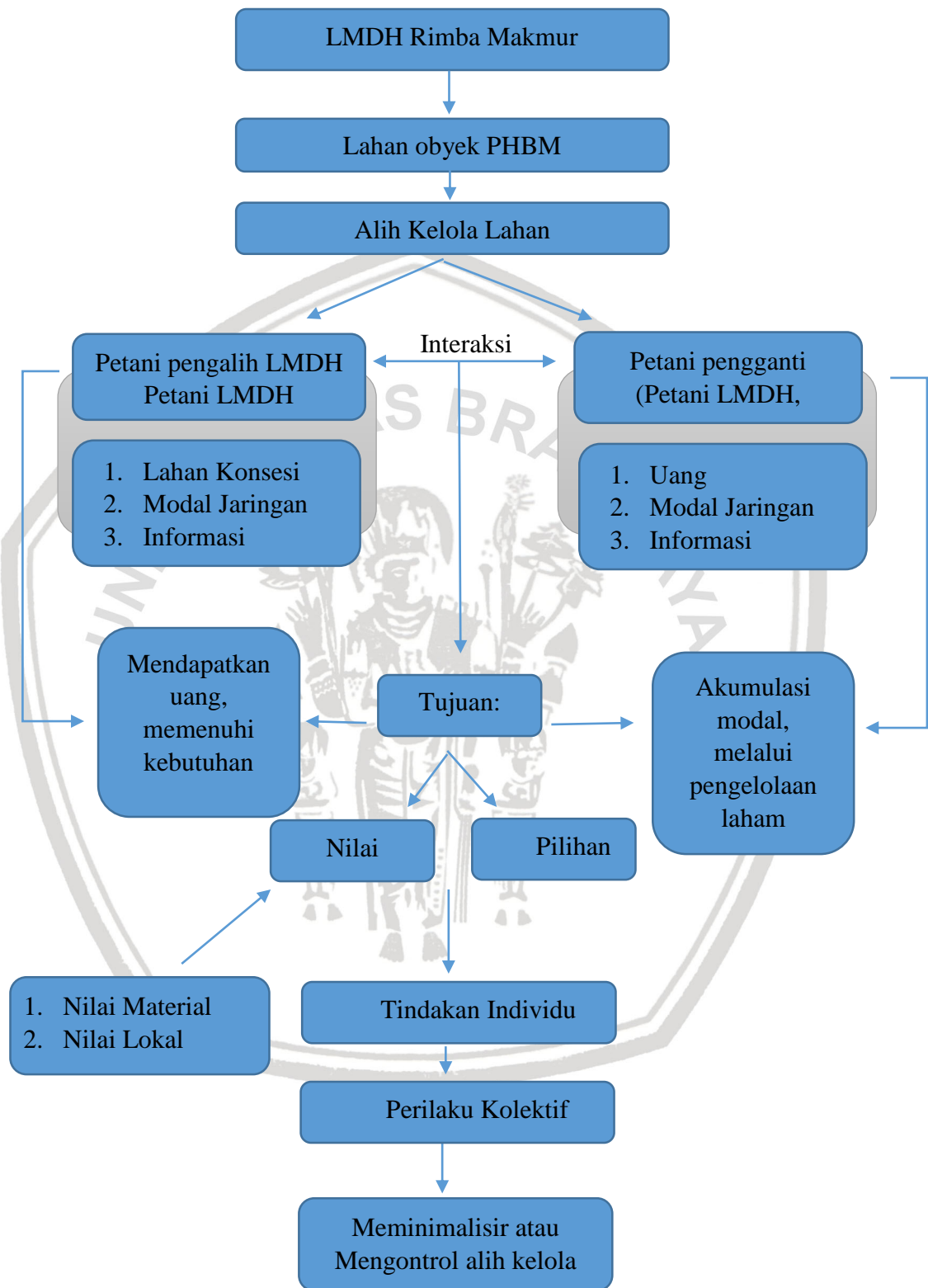
2.3.4 Petani Pesanggem

Petani pesanggem adalah petani yang menggarap lahan hutan milik Perhutani. Petani pesanggem umumnya berasal dari desa sekitar hutan. Pada umumnya petani pesanggem mengelola lahan di kawasan hutan yang telah selesai dilaksanakan tebangan oleh Perhutani, dengan ditanami aneka jenis palawija seperti jagung. Dalam penelitian ini petani pesanggem adalah petani yang menggarap lahan Perhutani melalui program PHBM.

2.3.5 Petani Pengalih dan Petani Pengganti

Petani pengalih atau petani melepas adalah petani yang mengalih kelolakan lahan program PHBM kepada petani pengganti. Sedangkan petani pengganti adalah petani yang menerima atau mengelola lahan dari hasil alih kelola lahan program PHBM di LMDH Rimba Makmur.

2.4 Alur Berfikir



Gambar 2.1 Alur Berfikir
Sumber: Olah data pribadi

Petani pada umumnya tinggal di daerah pedesaan, cara yang dilakukan untuk bertahan hidup salah satunya dengan cara mengolah tanah. Salah satu lahan yang menjadi areal bercocok tanam adalah lahan obyek PHBM yang dikonsesikan kepada LMDH Rimba Makmur dan dikelola oleh petani anggota LMDH hanya untuk diambil manfaatnya saja, sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Tetapi seiring berjalanya waktu terjadi tindakan alih kelola lahan yang dilakukan oleh petani penggarap lahan.

Tindakan alih kelola menurut individu lain belum tentu rasional karena terdapat resiko didalamnya, misal dalam jangka waktu pendek rasional untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat, dan dalam jangka panjang tidak rasional karena akan kehilangan akses salah satu sumber penghidupannya. Dari sisi pengganti, tindakan alih kelola tersebut mengandung resiko karena tanah bukan hak milik pribadi dan ketika pemilik yang sah yaitu Perhutani mengambil tanah maka akan kehilangan haknya untuk mengelola. Tetapi semua tindakan yang dilakukan semua aktor inilah pasti sudah melalui pertimbangan dan rasionalitas yang sadar akan resiko yang dihadapinya kelak. Dari perbedaan perpektif dan pandangan inilah perlu dikaji tentang rasionalitas aktor dalam menentukan setiap tindakan-tindakannya, pastinya setiap tindakan yang dilakukan aktor bukan sebuah pilihan mudah begitu saja, tetapi sudah melalui pemikiran dan dianggap rasional dari pada pilihan-pilihan lain untuk mencapai tujuanya atau kepentinganya. Rasional menurut individu dan tidak rasional menurut individu lain, semua itu harus dikembalikan kepada individu tersebut, bukan dari sudut pandang individu lain untuk menyikapi tindakan yang dilakukan.

Petani juga merupakan anggota masyarakat yang juga memiliki pilihan untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Menurut Coleman, pilihan-pilihan yang digunakan individu untuk mencapai tujuannya berupa 2 elemen yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat dikontrol oleh aktor dan dapat menarik perhatian pihak lain. Sumber daya tidak selalu dalam bentuk fisik tetapi informasi, jaringan juga termasuk sumber daya. Maka untuk mencapai tujuannya individu sadar bahwa sumber daya yang dimilikinya kurang menjadi kepentingannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tukar kuasa atas sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuannya yaitu sumber daya yang dapat dikontrol dan mendatangkan manfaat yang menjadi kepentingannya. Aktor dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan alih kelola dan petani pengganti lahan yang berasal dari anggota LMDH atau masyarakat umum.

Dalam kegiatan tukar sumber daya tersebut untuk memaksimalkan kepentingan petani. Petani memiliki sumber daya yang berupa lahan, jaringan dan informasi. Di sisi lain, petani pengganti memiliki sumber daya yang berupa materi (uang), jaringan dan informasi. Dari kedua aktor tersebut yang paling mencolok dalam kasus ini adalah tentang tukar sumber daya yang berupa uang dan lahan, sementara jaringan dan informasi merupakan faktor pendukung terjadinya pertukaran sumber daya untuk memaksimalkan tujuan. Sehingga dalam tindakan alih kelola ini pastinya aktor sudah melakukan pertimbangan diantara pilihan-pilihan yang ada sebelumnya. Perpindahan kekuasaan atas sumberdaya termasuk dalam tindakan besar dan tindakan alih kelola dan membeli tersebutlah yang dianggap paling rasional oleh aktor.

Aktor dalam kasus ini melalui observasi yang pernah dilakukan peneliti. Aktor pengalih sementara berjumlah 4 orang dengan inisial nama MJ, WD, MR dan aktor pengganti dengan inisial Sutikno dan Bonijo. Salah satu alasan yang sering muncul pada saat observasi adalah mereka menjual lahan karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada kenyataannya untuk mencapai tujuan aktor-aktor memiliki pilihan dan nilai (nilai materi barang dan nilai norma yang berlaku) sebagai pertimbangan dalam rasionalnya.

Tindakan alih kelola yang dilakukan petani anggota LMDH kepada petani pengganti sudah menjadi tindakan kolektif. Tindakan kolektif adalah tindakan yang bermula dari penyerahan kontrol secara rasional atas tindakannya kepada aktor lain yang melakukan tindakan sebelumnya. Dalam hal ini, petani meniru petani lain yang telah melakukan tindakan alih kelola lahan PHBM. Sehingga berawal dari tindakan individu lain itulah yang membuat aktor melakukan tindakan alih kelola. Perilaku kolektif ini dapat dicegah atau dikontrol dengan cara melihat atau mengetahui mengapa dan dalam kondisi seperti apa aktor rasional melakukan tindakan alih kelola lahan? Tujuan alih kelola tersebut adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan individu.

Pada permasalahan alih kelola ini tidak dapat dilepaskan adanya norma tentang alih kelola yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku kolektif juga didukung oleh norma yang lahir dari masyarakat dengan rasionalitas sadarnya. Dalam prosesnya alih kelola dilakukan dibawah tangan (diam-diam dan atas dasar kesepakatan tanpa adanya bukti legalitas tanah yang diserahkan). Norma ini berjalan seiring masyarakat dan anggota LMDH merasakan manfaat atau mendapat keuntungan dari berlakunya norma tersebut. Dalam pandangan Coleman, norma

yang baik adalah norma yang berasal dari consensus bukan yang berasal dari pembuat hukum formal yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Norma yang bersal dari konsensus inilah yang di intenalisasi oleh aktor-aktor alih kelola lahan. Sedangkan norma formal perhutanan tidak terjadi proses penghayatan oleh masyarakat, maka tidak adanya hak kontrol atas perilaku individu lain yang melanggar. Sehingga dari pernyataan tersebutlah dapat dicari pembuktian apakah benar norma dalam PHBM tidak diinternalisasi oleh anggota LMDH dan munculnya norma baru dan bertahan lama dalam tindakan alih kelola yang dilakukan pelaku-pelaku.

Dari gambaran di atas maka dapat diperoleh deskripsi dan jawaban tentang mengapa dan bagaimana tindakan alih kelola lahan obyek PHBM yang dilakukan oleh petani anggota LMDH dan dapat diketahui dapat alih kelola, serta langkah apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau mengontrol tindakan tersebut. Sehingga nantinya dapat memberikan masukan kepada LMDH, Perhutani dan masyarakat tentang pengelolaan lahan yang partisipatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagai upaya mencari, mengolah, menganalisis hasil penelitian tentang alih kelola lahan. Penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan Bogdan dan Taylor merupakan serangkaian proses penelitian untuk menghasilkan data deskripsi dalam berbentuk tulisan kata-kata maupun lisan dari informan yang sedang diteliti (Moleong, 2012: 6). Maka dengan pendekatan metode kualitatif ini dapat dihasilkan gambaran keadaan alih kelola lahan yang dilakukan oleh masyarakat anggota LMDH Rimba Makmur secara utuh dan alami. Sekaligus dapat mendeskripsikan secara jelas dan bermakna, dengan posisi peneliti sebagai instrumentnya.

Dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta empiris di lokasi penelitian (Moleong, 2008: 6). Penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkap fenomena alih kelola lahan yang dilakukan oleh anggota LMDH Rimba Makmur secara obyektif. Melalui penjelasan dari pertanyaan “mengapa”, “bagaimana” yang dimanfaatkan penelitian ini.

Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, bertujuan memperoleh gambaran deskriptif mengenai tindakan alih kelola lahan yang dilakukan oleh petani anggota LMDH Rimba Makmur. Deskripsi alih kelola lahan program PHBM dapat diperoleh melalui penjelasan tentang alasan rasional petani terlibat tindakan alih kelola lahan dan cara petani melakukan tindakan alih kelola lahan program PHBM. Lahan hutan yang notabene adalah lahan milik Perhutani dan bukan milik pribadi.

Dari penjelasan tersebut, nantinya juga dapat diperoleh gambaran tentang kepentingan petani pelepas dan petani pengganti dibalik tindakan alih kelola lahan program PHBM dari aspek ekonomi maupun sosia, seperti yang dijelaskan pada pilihan rasional James Coleman bahwa setiap tindakan yang dilakukan individu pasti memiliki kepentingan dan sudah melalui pertimbangan yang rasional.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini, difokuskan kepada alasan petani anggota LMDH Rimba Makmur yang melakukan tindakan alih kelola lahan obyek PHBM. Namun, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tindakan alih kelola tersebut, maka harus diketahui pilihan rasional petani penggarap sebagai pijakan dalam pembahasan penelitian. Selain itu, penelitian juga berupaya menjelaskan proses transaksi alih kelola lahan dan dampak pada petani anggota LMDH Rimba Makmur yang terlibat alih kelola lahan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi penelitian ini terjadi tindakan alih kelola lahan program PHBM yang notabene digunakan Perhutani sebagai lokasi pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, khususnya peningkatan pendapatan ekonomi petani penggarap dan juga sebagai daerah konservasi untuk menjaga ekologi lingkungan hutan. Tindakan alih kelola yang oknum-oknum anggota LMDH Rimba Makmur menyebabkan program PHBM tidak berjalan sesuai tujuan awalnya. Tujuan yang dimaksud adalah pemberian akses hutan kepada masyarakat miskin di sekitar hutan areal Perhutani dan menjaga kelestarian hutan.

3.4 Sumber Data

Data merupakan bahan yang sesuai untuk memberi jawaban terhadap masalah yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu (Afifuddin & Saebani, 2009: 117):

1. Data Primer

Data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari pendapat informan dan hasil observasi terhadap kondisi masyarakat dan fenomena yang terjadi. Kegiatan pengumpulan data primer yang dilakukan peneliti menggunakan observasi dan wawancara. Pada implementasinya di lokasi penelitian baik observasi maupun wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara jenis ini dilakukan dengan situasi tidak formal dan tidak terpaku secara penuh dengan panduan wawancara. Sedangkan observasi dilakukan dengan melihat lokasi lahan hutan dan kondisi petani penggarap lahan program PHBM.

2. Data sekunder

Data penelitian yang diperoleh melalui perantara atau pihak lain dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang penelitian. Berbentuk dari data ini adalah dokumentasi yang bersal dari pihak atau lembaga yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, penelliti mencari data sekunder dengan cara turun langsung menemui pihak Desa Tawing, LMDH Rimba Makmur dan Perhutani. Hasil dari pencarian data sekunder berupa profil Desa Tawing, dokumen gabungan hasil inventarisasi NKL tahun 2017, foto lahan, foto penagihan bagi hasil panen tahun 2018. Selain

itu, peneliti juga mencari artikel dan dokumen penunjang penelitian yang berkaitan dengan alih kelola lahan perhutani dan program PHBM di Pulau Jawa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nawawi (2012: 106) observasi adalah kegiatan pengamatan lapang, dengan melihat gejala-gejala yang nampak pada obyek yang sedang diteliti, kemudian dicatat secara sistematis oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi secara langsung dengan obyek penelitian. Serta posisi peneliti tidak terlibat sebagai anggota komunitas yang sedang diteliti.

Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengamatan di lokasi penelitian secara langsung dengan cara melihat kondisi wilayah; lokasi lahan, pemotretan lokasi, jenis tanaman, fenomena alih kelola lahan melalui obrolan singkat dengan petani, dan karakteristik masyarakat mulai dari pekerjaan, ketergantungan. Pengamatan tentang alih kelola lahan PHBM, dilakukan peneliti semenjak adanya rencana melakukan penelitian sampai penelitian ini berlangsung. Hasil dari observasi yang berupa catatan lapang, perekaman singkat tentang fenomena alih kelola lahan menunjang data untuk analisis dalam penelitian ini, melalui keterangan masyarakat tentang alih kelola.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pengajuan pertanyaan kepada informan

penelitian (Sugiyono, 2010). Informan yang akan dimintai keterangan dalam penelitian ini adalah masyarakat anggota LMDH yang melakukan transaksi alih kelola, petani yang tidak melakukan alih kelola, pengurus LMDH dan Perhutani Pangkuan Munjungan Timur. Penggalan data ini dilakukan dengan menggunakan pedoman *guide interview* yang telah dibuat sebelumnya. Pada implementasinya peneliti menggunakan wawancara *semi terstruktur* guna mencairkan suasana antara informan dan peneliti, sekaligus untuk mengembangkan informasi dan kajian tentang alih kelola lahan.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan kepada pihak Perhutani mengalami kendala karena tidak mendapat izin dari Perhutani unit II Jawa Timur. Meskipun, terdapat kendala dalam pengambilan data yang pasti sedikit atau banyak mempengaruhi kedalaman informasi dan analisis tentang fenomena alih kelola lahan. Masalah tersebut dapat atasi dengan cara meminta keterangan dari pihak LMDH yang sedikit tahu tentang batas wilayah obyek PHBM di LMDH Rimba Makmur. Hasil informasi dari wawancara ini merupakan data inti yang dibutuhkan peneliti untuk mendeskripsikan tindakan alih kelola nantinya.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi menurut Arikunto (2010: 134) adalah pengumpulan data yang berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Profil Desa Tawing
- b. Data gabungan hasil inventarisasi NKL tahun 2017 di LMDH Rimba Makmur dan AD/ART. Pada penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan peta lokasi program PHBM yang resmi, karena LMDH tidak memiliki peta lokasi garapan dan pihak Perhutani tidak memberikan izin penelitian. Sehingga peta lokasi diperoleh melalui keterangan dari ketua LMDH dan ketua kelompok kerja (pokja) tiga.
- c. Artikel, Jurnal terkait PHBM dan dokumentasi yang berupa foto dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi langsung dilapangan dan pada saat wawancara.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sample*. *Purposive sample* adalah teknik penentuan informan dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009: 85). Dalam penelitian ini informan sudah ditentukan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan keterangan tentang fenomena alih kelola lahan. Berikut karakteristik informan dalam penelitian ini:

1. Informan yang terlibat langsung dengan tindakan alih kelola lahan yaitu petani pengalih dan petani pengganti.
2. Informan yang mengetahui program PHBM dan LMDH Rimba Makmur, yaitu pengurus LMDH Rimba Makmur dan masyarakat yang tidak terlibat alih kelola lahan obyek PHBM.

Penetapan informan masing-masing memiliki tujuan. Petani pengalih kelola memberikan keterangan tentang motivasi, proses terjadinya transaksi alih kelola

lahan. Begitu juga kepada petani pengganti tentang motivasi mengolah lahan dan proses terjadinya alih kelola.

Sedangkan, Pihak LMDH Rimba Makmur yang diminta keterangan adalah ketua LMDH dan ketua pokja yang dapat memberikan keterangan tentang sejarah pengelolaan hutan sampai munculnya LMDH Rimba Makmur, perjanjian-perjanjian yang ada, dan kendala-kendala yang dihadapi LMDH, serta masalah alih kelola lahan dan penegakannya. Dengan spesifikasi tersebut, maka deskripsi tentang tindakan alih kelola lahan PHBM dapat terdeskripsikan secara sistematis.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) dalam analisis kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang perlu dilakukan dalam penelitian. Kegiatan dalam analisis data yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, meringkas, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data dari catatan-catatan lapangan, hasil transkrip wawancara dari informan, kumpulan dokumen dan data empiris yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang alih kelola lahan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014: 31).

Kondensasi yang dilakukan dengan cara memberi kategori kepada hasil transkrip wawancara yang telah dilakan. Kategori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori pilihan rasional dan konsep-konsep yang digunakan, seperti tujuan, sumber daya, dampak PHBM; baik pasca maupun sesudah alih kelola, proses alih kelola, aktor-aktor yang

terlibat. Hasil dari pengkategorian ini untuk mempermudah proses penganalisisan informasi penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering menggunakan naratif untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bentuk uraian data seperti bagan, uraian singkat dan penjelasan lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk teks naratif untuk menjelaskan fenomena alih kelola lahan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014: 32).

Bentuk dari penyajian data ini adalah analisis dari hasil kondensasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan memadukan teori dan konsep yang digunakan. Berbagai kutipan kutipan wawancara, kutipan dokumentasi baik aturan dan foto disajikan guna menjawab fokus penelitian, tentang alih kelola lahan obyek PHBM.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi)

Penarikan kesimpulan diperoleh dari hasil verifikasi data yang telah terkumpul selama penelitian, yang telah melalui analisis data. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian tentang fenomena alih kelola lahan. Dengan adanya kegiatan ini hasil kesimpulan dapat bersifat objektif dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi digunakan untuk mengecek ulang kebenaran informasi yang didapatkan dari hasil penelitian. Triangulasi menurut Moleong (2001, 173-180) adalah teknik verifikasi kebenaran data dengan menggunakan data lain diluar data

inti, untuk kegunaan pengecekan atau pembandingan terhadap data inti. Penelitian ini memilih menggunakan triangulasi sumber data penelitian dan triangulasi metode yaitu hasil wawancara, studi dokumentasi dan hasil observasi.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini, dilakukan untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai hasil wawancara dengan informan penelitian. Pada penerapannya peneliti membandingkan hasil wawancara informan dengan informan lain, untuk mencari kecocokan dan perbedaan keterangan antar informan. Sedangkan penggunaan triangulasi metode dalam penelitian ini, yaitu dengan membandingkan data penelitian dari hasil observasi lapang, wawancara, data dokumentasi baik jurnal atau artikel yang berkaitan dengan pilihan rasional petani dalam tindakan alih kelola lahan obyek PHBM dan dampak dari alih kelola lahan terhadap petani penggarap. Melalui teknik ini, diperoleh data yang valid dan terverifikasi tentang pilihan rasional petani pada alih kelola lahan obyek PHBM.

Selain itu, penelitian ini dilakukan selama lima bulan yaitu mulai bulan Maret 2018 sampai Juli 2018. Lamanya waktu penelitian karena peneliti berusaha mendapatkan data dari pihak Perhutani baik peta lokasi program PHBM dan wawancara yang lebih mendetail tentang program PHBM dan pendapat pihak Perhutani tentang tindakan alih kelola lahan yang dilakukan petani anggota LMDH. Perspektif pihak Perhutani dianggap peneliti penting karena dapat mempertajam analisa dan data dalam penelitian ini, akan tetapi informasi tentang perspektif dan data-data dari pihak Perhutani tidak bisa dilakukan dan didapatkan peneliti karena terkendala masalah perizinan baik dari Pihak Perhutani wilayah pangkuan, KPH Kediri dan dari pihak Perhutani Unit II Jawa Timur yang tidak memberikan izin penelitian sampai jenjang waktu berakhirnya penelitian ini.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kecamatan Munjungan

Salah satu lokasi program PHBM adalah Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang merupakan wilayah pangkuan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri. Dikarenakan walaupun Munjungan memiliki sumber daya hutan dengan topografi wilayah yang mendukung untuk bercocok tanam melalui perkebunan dan ladang.



Gambar. 4.1 Peta Kecamatan Munjungan
Sumber: Pratama (2016)

Munjungan merupakan Kecamatan yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan samudra Hindia. Dibidang pemerintahannya Kecamatan Munjungan terdiri dari 11 desa, dengan rincian 3 desa mayoritas dataran, yaitu Desa Masaran, Desa Munjungan dan Desa Tawing, sedangkan 8 desa lain berada pada pegunungan. Dari gambaran karakteristik wilayah tersebut sangat cocok digunakan untuk kegiatan aspek pertanian dan perikanan. Tetapi sebagian besar masyarakat Kecamatan Munjungan memilih melakukan kegiatan pertanian sawah

dan pertanian hutan, serta didukung oleh ketersediaan lahan. Dari pemaparan BPS Trenggalek 2016 menyebutkan luas lahan Munjungan berjumlah 15,481 ha yang terdiri dari:

Tabel. 4.1 Jenis dan Luas Tanah Di Kecamatan Munjungan

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tanah sawah	849	5,48
2	Tanah kering	14.632	94,52
	1. Tanah tegal	2.588	16,72
	2. Tanah perkebunan rakyat	548	3,53
	3. Tanah bangunan dan sekitarnya	822	5,31
	4. Tanah lain-lain	78	0,50
	5. Tanah hutan negara	10.595	68,44
Jumlah		15.481	100

Sumber: Olah data pribadi dari BPS 2016

Table 4.1 menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan di Kecamatan Munjungan sebesar 68,44% adalah tanah negara dan izin pengelolaannya dimiliki oleh Perhutani.

Hasil hutan menyumbang kemakmuran bagi masyarakat Munjungan dengan produk cengkeh. Hal tersebut tercermin dari banyaknya respon pendatang yang berkunjung melihat kemajuan ekonomi di Kecamatan Munjungan. Kemajuan perekonomian sangat jelas terlihat kalau berkunjung ke Desa Bangun. Desa tersebut secara geografis memiliki kontur tanah pegunungan yang tidak rata, tetapi di wilayah Desa Bangun terdapat rumah-rumah dengan gaya modern, seperti villa-villa mewah di perbukitan, mobil dan kendaraan bermotor tertata dengan rapi di rumah-rumah penduduk. Salah satu penunjang kemakmuran wilayah Kecamatan Munjungan adalah hasil dari pengelolaan hutan (Kurniawan, 2016).

Sejarah panjang tentang sistem pengelolaan hutan di Kecamatan Munjungan tidak lepas dengan peralihan rezim negara ini. Pada waktu Orde Baru masyarakat

dilarang menguasai hutan atau melakukan penebangan. Setiap masyarakat melakukan pembalakan ditangkap polisi hutan dan diadili. Dari kebijakan tersebut, masyarakat tidak berani melakukan aktivitas di lahan negara. Pemabatasan akses masyarakat sekitar hutan kepada lahan hutan karena adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Orientasi dari kebijakan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, penopang industri dan ekspor. Selain itu, hutan khususnya di Pulau Jawa dikuasai penuh oleh negara melalui Perhutani (Rachman, 2012: 41-42). Tidak heran jika dalam penerapannya undang-undang tersebut tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat dan condong bersifat represif kepada masyarakat. Represif yang dimaksud adalah penerapan hukum positif yang dilakukan Perhutani kepada masyarakat untuk mengamankan pengelolaan sumber daya hutan mereka.

Gerakan reformasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa mengelola hutan. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat mulai bisa melakukan aktivitas pengambilan hasil hutan berupa kayu. Adanya aktivitas penebangan kayu yang dilakukan masyarakat membuat hutan mengalami degradasi. Maka untuk mengatasi masalah degradasi lahan dan penebangan kayu secara masif, Perhutani mengimplementasikan program PHBM. Jika telusuri lebih jauh sebenarnya program PHBM sudah dimulai sejak tahun 2001, melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, tetapi untuk di wilayah Kecamatan Munjungan dimulai pada tahun 2006.

Dengan berlakunya program PHBM, masyarakat sekitar hutan mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pengelolaan lahan hutan yang

dimaksud adalah pengelolaan hutan secara lestari; lestari secara ekonomi dan lestari secara ekologi. Hasil pengelolaan hasil hutan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan dapat menjaga kelestarian hutan. Secara status wilayah hutan di Kecamatan Munjungan berada pada wilayah kerja RKPH Kampak, KPH Kediri.

4.2 Gambaran Umum Desa Tawing

4.2.1 Keadaan Geografis Tempat Penelitian

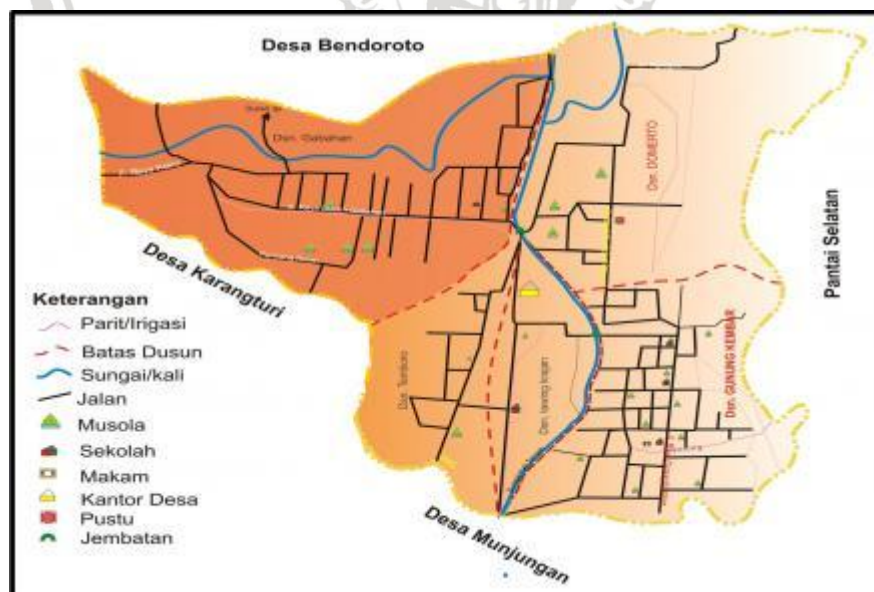
Desa Tawing merupakan desa yang memiliki luas wilayah 5.715,79 Ha, dengan ketinggian 55 meter di atas permukaan laut. Desa Tawing memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Munjungan dan Desa Karangturi

Selatan: Samudra Hindia

Timur : Desa Bendoroto dan Desa Bangun

Barat : Desa Munjungan.



Gambar. 4.2 Peta Desa Tawing
Sumber: Profil Desa Tawing 2015

Gambar 4.2 merupakan peta Desa Tawing yang mana desa tersebut merupakan lokasi penelitian peneliti. Desa Tawing memiliki 5 dusun yaitu Dusun Gunung Kembar, Dusun Domerto, Dusun Temboro, Dusun Gabahan, dan Dusun Tawing Krajan. Jumlah penduduk 5.505 jiwa dari 1763 Kepala Keluarga (KK). Secara umum masyarakat desa Tawing bermata pencarian di sektor pertanian sebanyak 1.510 orang, perkebunan 1.510 orang, peternakan 150 orang, Perikanan 375 orang, pertambangan dan bahan galian C 70 orang, dan perdagangan 60 orang. Dari data di atas sektor pertanian dan sektor perkebunan menempati posisi utama pada mata pencaharian masyarakat Desa Tawing.

Tabel. 4.2 Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaanya

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tanah Sawah		
	1. Sawah irigasi	243	4,25
	2. Sawah tadah hujan	178	3,12
	Sub total	421	7,37
2	Tanah Kering		
	1. Tegal/ladang	225,5	3,94
	2. Pemukiman	718,5	12,57
	3. Pekarangan	168	2,94
	Sub total	1.112	19,45
3	Tanah Basah		
	1. Situ/waduk/danau	2,5	0,04
4	Tanah Perkebunan		
	1. Tanah perkebunan perorangan	409	7,16
5	Tanah Fasilitas Umum	3.038,79	53,16
6	Tanah Hutan		
	1. Hutan lindung	409	7,16
	2. Hutan Produksi	329	5,76
	Sub total	732,5	12,92
Total		5.715,79	100

Sumber: Profil Desa Tawing 2015

Dari **tabel 4.2** diketahui bahwa terdapat tanah hutan sebesar 12,92% dan lahan hutan tersebut dikelola oleh Perhutani (Pemerintah Desa Tawing, 2015: 6). Dari hasil

penelitian, menurut pengurus LMDH Rimba Makmur diketahui bahwa tanah hutan yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi dikelola oleh masyarakat desa hutan (MDH) dengan Perhutani RPH Munjungan Timur. Saat ini, wadah Masyarakat Desa Hutan adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Makmur.

Alih kelola lahan program PHBM yang terjadi antara sesama penggarap, penggarap dengan masyarakat umum yang notabene didasari oleh alasan tertentu dan rasional masing-masing pelaku yang berbeda. Dalam program PHBM secara aturan, petani penggarap yang tidak mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak boleh menggarap hutan PHBM. Namun, saat ini, ada sebagian penggarap tidak memiliki KTA menggarap lahan akibat adanya alih kelola lahan.

4.2.2 Kondisi Penduduk

Berdasarkan data dari profil Desa Tawing Tahun 2015 jumlah penduduk pada 2015 sebanyak 7.268 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 3.617 orang dan jumlah penduduk perempuan 3.651 orang. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.755 KK yang tersebar di 5 dusun, 10 RW dan 53 RT. Dari kelima dusun tersebut menurut Bu Irum (anggota PKK Desa Tawing),

“Untuk dusun dengan jumlah penduduk paling padat saat ini (2018) adalah dusun Domerto, sehingga tahun ini mereka dapat program kampung KB”.

Sebagian besar warga Dusun Domerto berprofesi sebagai petani sawah, petani hutan dan nelayan, karena lokasi tersebut dekat dengan pantai Ngampiran, persawahan dan hutan.

Dari data demografi mengenai Desa Tawing diketahui bahwa mata pencaharian pokok masyarakat Desa Tawing sebagian besar sebagai petani dan nelayan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tawing

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (L+P)	Persentase (%)
1. Petani	1.151	359	1.510	63
2. Buruh tani	157	108	265	11,06
3. Buruh migran perempuan	-	-	-	-
4. Buruh migran laki-laki	-	-	-	-
5. Pegawai negeri sipil (pns)	40	34	74	3,09
6. Pengrajin Industri rumah tangga	8	-	8	0,33
7. Pedagang keliling	11	-	11	0,46
8. Peternak	40	-	40	1,67
9. Dokter swasta	-	-	-	-
10. Bidan swasta	-	-	-	-
11. Pensiunan TNI/POLRI	26	9	35	1,46
12. Perawat swasta	-	1	1	0,04
13. Nelayan	390	-	390	16,27
Jumlah	1.839	558	2.397	100

Sumber: Profil Desa Tawing Tahun 2015

Berdasarkan **tabel 4.3** masyarakat Desa Tawing yang bekerja sebagai petani sebanyak 63%, dengan perbandingan kepemilikan lahan pertanian 1.041 orang keluarga yang memiliki lahan dan 469 orang keluarga yang tidak memiliki lahan. Jenis komoditas tanaman masyarakat yaitu padi yang pada tahun 2015 menghasilkan panen 18 Ton/ha. Selain itu, hasil komoditas perkebunan sebanyak 184,5 Ton/ha dengan luas 409 Ha. Hasil tersebut diperoleh dari tanaman cengkeh seluas 308 Ha dan tanaman kelapa 101 Ha. Pertanian kehutanan dengan luas lahan hutan 732,5 Ha yang dikelola oleh masyarakat dengan Perhutani menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat petani. Kegiatan bertani dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai sumber pendapatan keluarga.

Pekerjaan sebagai nelayan menjadi profesi terbanyak ke dua dengan persentase 16,27%. Hal tersebut karena lokasi Desa Tawing di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Ada dua lokasi pangkalan nelayan di Desa

Tawing yaitu di Pantai Ngampiran dan Pantai Lonjo. Komoditas hasil tangkapan nelayan yaitu ikan, lobster, gurita, cumi-cumi, rumput laut, dan kerang, jenis-jenis hasil tangkapan tersebut sesuai dengan musimnya.

Jenis pekerjaan lain yang diguluti masyarakat Desa Tawing antara lain buruh tani sebesar 11,06% . Menjadi buruh tani di Desa Tawing dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, buruh laki-laki sebagai buruh panen padi, sedangkan buruh perempuan sebagai buruh tandur, membersihkan gulma tanaman yang dianggap hama dan buruh pemisah padi antara yang berisi dan yang kosong. Pekerjaan lainnya berupa peternak sebanyak 1,67%, PNS 3,09%, pengrajin industri rumah tangga 0,33%, pedagang keliling 0,46%, pensiunan TNI/POLRI 1,46%, perawat swasta 0,04%, dokter swasta dan bidan swasta tidak ada, sedangkan pekerja migran laki-laki dan perempuan juga tidak ada. Tetapi dari observasi lapangan terdapat buruh migran di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Korea, Singapura dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Pekerjaan mereka di luar negeri sebagai buruh pabrik, bangunan, dan pembantu rumah tangga.

Dari berbagai macam pekerjaan yang dilakukan warga masyarakat tersebut tidak hanya menjadi mata pencarian utama tetapi juga memiliki mata pencarian sampingan. Mata pencarian tambahan yang dilakukan masyarakat seperti beternak dan menjadi nelayan disela-sela pekerjaan utama sebagai petani, hasil dari pekerjaan sampingan tersebut bahkan dapat melebihi pendapatan utamanya. Sehingga pendapatan dari pekerjaan sampingan tersebut dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Pekerjaan sebagai petani di Desa Tawing didukung oleh kondisi lingkungan dan kebijakan instansi terkait sektor pertanian, kehutanan dan kelautan. Kebijakan

untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam sektor agraris, seperti program PHBM, bantuan pupuk, bibit tanaman, bantuan program mekanisasi pertanian sawah. Maka dari kebijakan tersebut terdapat dua jenis petani petani sawah, petani kebun. Petani kebun tersebut masih di bagi menjadi dua lagi yaitu petani kebun tegal dan petani kebun hutan.

4.2.3 Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Tawing

Secara umum kondisi masyarakat Desa Tawing berada pada tingkat Keluarga Sejahtera 1 dan prasyarat tipe ini adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri tetapi belum dapat memenuhi secara sosial dan psikologis. Sementara itu, keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan sandang, kesehatan, dan spiritual (Dwiyanto, 1998:38). Berikut rincian tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Tawing:

Tabel. 4.4 Kesejahteraan Keluarga

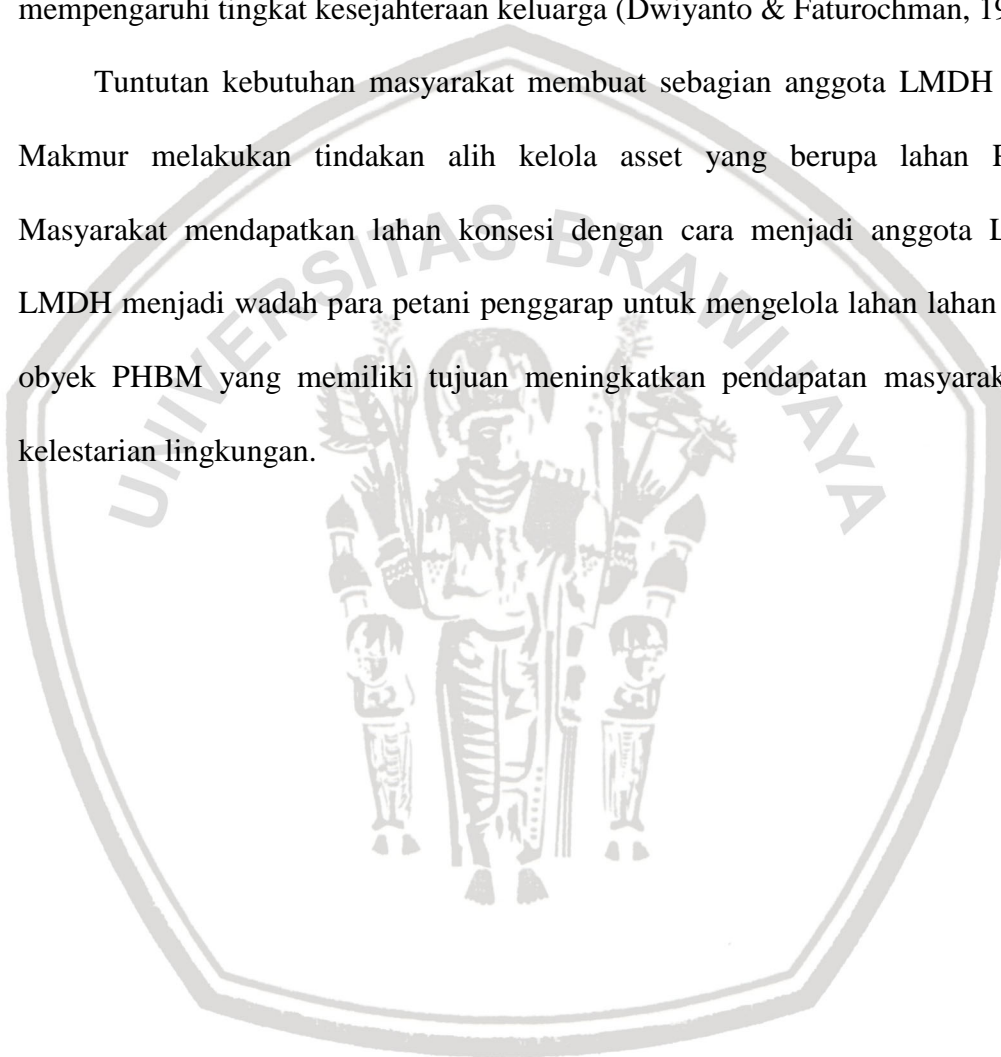
Tingkat keluarga sejahtera	Jumlah (KK)	Persentase (%)
Keluarga Prasejahtera	615	34.88
Sejahtera 1	836	47.42
Sejahtera 2	281	15.94
Sejahtera 3	31	1.76
Sejahtera 3 Plus	-	-
Jumlah	1763	100

Sumber: Profil Desa Tawing 2015

Tingkat kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal seperti pekerjaan, pendapatan, kepemilikan asset, pendidikan, umur, dan tabungan. Sedangkan faktor eksternal seperti lokasi tempat tinggal, akses finansial, akses perkreditan, pelayanan pemerintah. Selain itu, faktor manajemen keluarga seperti pembagian kerja, perencanaan keluarga dan pengontrolan aktivitas keluarga. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga (Iskandar, Hartoyo, Sumarwan, & Khomsan, 2009: 138-139).

Dengan banyaknya tekanan kebutuhan hidup memaksa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan pengalihan asset. Tindakan pengalihan tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang di inginkan, karena semakin kecil pendapatan dan semakin sedikit pula asset yang dimiliki seseorang. Selain itu, manajemen keluarga yang baik seperti pengaturan finansial dan kegiatan keluarga juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga (Dwiyanto & Faturachman, 1998).

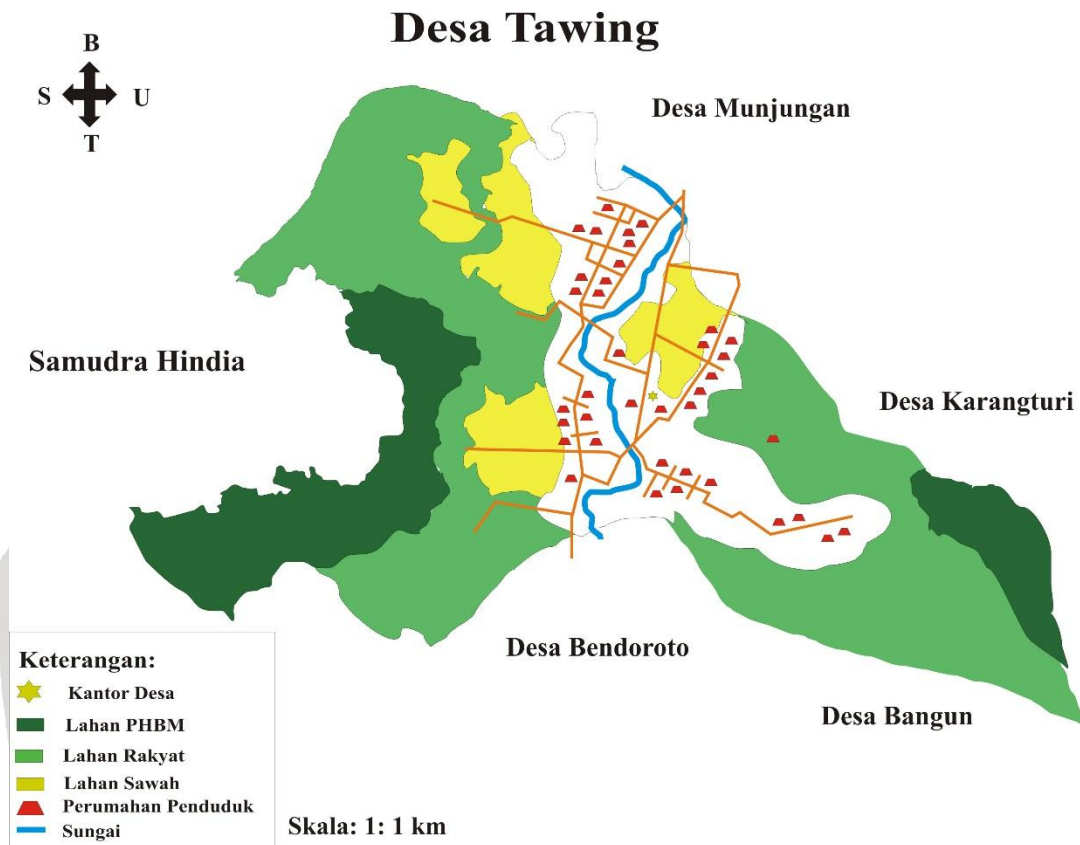
Tuntutan kebutuhan masyarakat membuat sebagian anggota LMDH Rimba Makmur melakukan tindakan alih kelola asset yang berupa lahan PHBM. Masyarakat mendapatkan lahan konsesi dengan cara menjadi anggota LMDH. LMDH menjadi wadah para petani penggarap untuk mengelola lahan lahan negara obyek PHBM yang memiliki tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.



4.2 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

4.2.1. Sejarah dan Kondisi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba

Makmur



Gambar 4.3 Peta Desa Tawing dan Lahan LMDH Rimba Makmur

Sumber: Olah data wawancara dan data pribadi dari citra googlemap pada 2018

Munjungan berasal dari singkatan ungkapan “*Munjung-munjungeng pangan*” yang artinya kelebihan makanan. Kecamatan Munjungan memiliki kondisi geografis berupa pegunungan dan lautan. Hutan pegunungan yang dahulunya rimbun mengalami perubahan akibat alih fungsi lahan menjadi lahan produksi. Pada masa Orde Baru masyarakat Desa Tawing yang tinggal di sekitar hutan tidak bisa mengakses hasil hutan karena pada masa tersebut hutan dikuasi negara untuk kepentingan pertumbuhan bisnis/ekonomi dan bukan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, Perhutani

selaku wakil dari pemerintah mengamankan sumber daya hutan dari gangguan masyarakat menggunakan prinsip-prinsip represif dan hukum positif. Hal tersebut seperti yang di sampaikan oleh Pak B:

Jaman bien ke alas ke dicekel perhutani, masyarakatkan ndak enjoh, lek babat malah di ikum lho. Babat karo nandur yo di ukum, pomono nandur pari dicekel diukum 7 sasi sekali konangan kuwi, mandar kek Jaenuri, kek sopingi, kek Musijo Krentel nandur dele yo di ukum lo. Pokoke babat alas kuwi di ukum.

(Jaman dulu pengelolaan hutan dipegang oleh Perhutani, masyarakat malah tidak bisa mengakses lahan hutan, walaupun ada yang membuka lahan dan menanam akan dihukum. Misalnya sekali ketahuan menanam padi akan ditangkap dan dihukum 7 bulan seperti Mbah Jaenuri, Mbah Sopingi, Mbah Musijo Krentel menanam kedelai dihukum. Intinya membuka lahan hutan itu dihukum) (wawancara dilakukan pada 8 Juni 2018).

Jenis pengelolaan hutan yang diterapkan oleh Perhutani pada masa Orde Baru tidak dapat mengakomodasi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kepentingan yang dimaksud adalah memanfaatkan hutan hutan sebagai sarana untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun di sisi lain, pengelolaan hutan seperti yang dijelaskan di atas dapat menjaga kelestarian lingkungan karena hutan hanya digunakan sebagai lahan produksi Perhutani. Sehingga masyarakat sekitar hutan hanya sebagai penonton di tengah leluasanya Perhutani mengakses hasil hutan.

Adanya reformasi membuat kebijakan pengelolaan hutan sedikit demi sedikit mulai berubah, namun belum sepenuhnya berubah. Faktor Reformasi memunculkan gagasan pengelolaan hutan yang berkeadilan (Santoso, 2002: 8). Masyarakat sekitar hutan di Desa Tawing yang sebelumnya termarginalkan, mulai bisa melakukan aktivitas pengelolaan dan pengambilan hasil hutan. Gagasan tersebut muncul seiring adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang di implementasikan oleh Perhutani dalam bentuk program *bespel*.

Program *bespel* yang diterapkan di Desa Tawing yaitu pengelolaan hutan antara masyarakat dengan Perhutani dalam jangka waktu tahunan. Menurut penuturan Pak B pada 8 Juni 2018, tanaman pertama yang ditanam masyarakat bersama Perhutani berupa kayu akasia, wali tanah dan pinus. Selain dari hasil kayu, petani juga dapat mengelola lahan dengan cara tumpang sari seperti menanam palawija, singkong dan padi. Hasil dari program *bespel* sedikit membantu perekonomian keluarga petani hutan, meskipun hanya dalam waktu tertentu dan tidak dapat dikelola kembali. Sebenarnya kebijakan dari Perhutani yaitu setiap 3 tahun sekali lahan *bespel* harus ditutup dan tidak boleh menanam dibawah tegakan.

Seiring berjalanya waktu, program *bespel* memiliki potensi konflik antara masyarakat sekitar hutan dan Perhutani. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang menantikan bisa mengelola hutan untuk meningkatkan taraf hidupnya tersandra kembali akibat selesainya program *bespel*. Lahan *bespel* yang sudah 3 tahun dikerjakan ditutup dan diambil alih kembali oleh Perhutani, pengambil alihan lahan tersebut membuat resistensi di masyarakat. Masyarakat yang merasa termarginalkan mulai menjarah hasil hutan seperti kayu, sedangkan disisi lain pihak Perhutani menggunakan pendekatan pendekatan represif untuk mengamankan hutan. Sehingga terjadi kerusuhan antara pihak Perhutani yang dibantu Polisi dengan masyarakat.

Konflik yang terjadi di atas karena ada anggota masyarakat yang mengambil kayu di hutan paska pogram *bespel* berakhir. Proses terjadinya kerusuhan dijelaskan Bapak B selaku saksi mata peristiwa berikut pernyataanya:

Mantri ke jane arep oprasi, oprasi neng omah. Eneng uwong-uwong biyenke nyolongi kayu, kayu mauni, kayu kormis kuwi. Tanaman asale bespel wes wayahe enak dipangan ditegali uwong digawe omah, digawe padolan nyatu yo gedi-gedi... Mandor karo mantri kuwi ngerti...Gek kuwi petugas Mantri alas, Mandor karo Polisi teko kono arep oprasi nyang mae Nor kantuk kuwi mau, pokoke sak gemiring arep dioprasi...Di takoni surat arep oprasi...Boso anu ngomong surate keru neng omah...wong-wong kuwi langsung moro, nyatu

wes dikomando nyatunan, wong langsung gruduk ngantemi petugas kuwi maeng....Nyatu yo geheran.

(Mantri mau oprasi, oprasi di rumah warga. Dulu kan ada orang yang mencuri kayu seperti kayu mahoni, kayu kormis. Tanaman itu awalnya adalah tamanan *bespel* dan sudah waktunya dapat diambil hasilnya tetapi pohon yang ukuranya sudah besar ditebang oleh orang untuk dibuat rumah dan dijual... Mandor dan mantri itu tahu bahwa terjadi penebangan liar... Kemudian mantri hutan, mandor dan polisi mau oprasi di rumahnya Nor Kantuk, intinya semua wilayah di Gemiring mau di oprasi...ditanya surat izin oprasi... Kemudian ada yang ngomong suratnya ketinggalan di rumah... Orang-orang pada langsung datang dan memang sudah dikordinir sebelumnya. Orang-orang tersebut langsung berdatangan memukuli petugas tadi...Memang ya kerusuhan (wawancara pada 8 Juni 2018).

Adanya konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani memberikan gambaran bahwa pembatasan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dan penggunaan pendekatan represif kepada masyarakat untuk mengamankan hutan sudah tidak lagi efektif untuk diterapkan atau dilanjutkan lagi.

Perlawanan terbuka yang dilakukan masyarakat sebagai cara bertahan untuk mendapatkan hasil hutan. Kekecewaan masyarakat akibat tidak dapat mengelola hutan paska program *bespel* dan ditambah dengan adanya nilai ekonomis dari tamanan tegakan hutan. Sementara itu, pendekatan represif melalui penegakan untuk tidak didukung dengan jumlah personil Perhutani beserta sarana dan prasarana yang memumpuni. Maka untuk merekonsiliasi konflik dan permasalahan pengelolaan hutan diperlukan pengelolaan hutan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar hutan dan Perhutani.

Program yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pijakan dasar program ini tetap pada Undang-Undang Nomer 41 tahun 1999. Pada tahun 2006 di Desa Tawing dibentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang menjadi wadah untuk memobilisasi dan mengkoordinasi masyarakat untuk mengelola hutan. Disaat

sebelumnya, kegiatan *illegal logging* oleh masyarakat mengakibatkan degradasi hutan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak K selaku Mantri RPH Munjungan Timur berikut pernyataanya:

Intine mbien kuwi hutan neng wilayah iki seng milike Negaro lan hutan lindung kuwi dikelola Negara secara penuh melalui Perhutani. Tugase perhutani iku menjaga hutan kuwi mau. Pada pasca reformasi seng keblabalasan, dimana pengelolaan hutan seng wes enek mbien dadi merusak hutan, tapi yo jenenge masyarakat yo enek seng jupuki nebang alas. Zaman semono Perhutani yo tegas nang masyarakat, yo jenenge jalanke tugas ko negoro. Bar ngono gen ojo eneng kejadian pengerusakan hutan moko di enekno PHBM teko sakiki... Dasare yo kuwi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang didalamnya memuat siapa yang berhak mengelola, kewajiban seng kudu dipatuhi lan larangane seng kudu ditaati. Tujuane intine untuk menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

(Intinya hutan di wilayah ini yang dimiliki negara dan hutan lindung itu dikelola sepenuhnya oleh negara melalui Perhutani. Tugas dari Perhutani adalah menjaga hutan tersebut. Pada pasca reformasi yang keterusan pengelolaan yang sudah ada dulu menjadi kegiatan merusak hutan karena ada yang mencuri kayu di hutan. Zaman dulu Perhutani tegas karena menjalankan tugas negara. Supaya tidak ada kejadian seperti itu maka dibuatlah PHBM sampai sekarang, kalau bilang dasarnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang di dalamnya memuat siapa yang berhak mengelola, kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus ditaati) (wawancara pada 1 Juni 2018).

Tahapan pelaksanaan program PHBM di Desa Tawing dimulai dari:

1. Sosialisasi program PHBM

Sosialisasi program PHBM di Desa Tawing dipandu oleh pihak Perhutani yang membahas tentang maksud, tujuan dari program PHBM dan membangun kesepahaman antara masyarakat dan Perhutani. Menurut Pak R pada saat itu lokasi sosialisasi berada di balai Desa Tawing dengan melibatkan petani sekitar hutan. Setelah adanya sosialisasi masyarakat dan pihak pemerintahan terkait diharapkan masyarakat dapat mempertimbangkan program PHBM. Jika masyarakat setuju dengan program PHBM maka masyarakat petani hutan dapat melanjutkan ke tahap pembentukan wadah kelembagaan.

2. Pembentukan Lembaga

Pembentukan LMDH sebagai wadah dan koordinasi bagi masyarakat desa hutan dengan Perhutani dalam mengelola lahan program PHBM. Selanjutnya dalam pembentukan LMDH masyarakat harus membuat struktur kepengurusan, keanggotaan dan pembuatan AD/ART yang pada akhirnya didaftarkan kepada notaris untuk mendapatkan badan hukum dan akta notaris. Pada saat musyawarah pembentukan LMDH pihak-pihak yang terlibat yaitu masyarakat petani hutan dan pemerintah Desa Tawing untuk menyamakan dan membangun persepsi kelembagaan. Menurut Pak R pada saat wawancara pada 26 Juni 2018, musyawarah pembahasan AD/ART samapi 15 kali rapat dengan anggota karena menyangkut bagi hasil antara masyarakat pesanggem dan Perhutani. Pembahasan AD/ART dilakukan ditingkat Perhutani Kediri dan hasil diskusi ditingkat Pusat dibawa kembali ke forum anggota LMDH. Sehingga pada akhirnya menemukan proporsi bagi hasil 60% untuk masyarakat penggarap dan 40% untuk Perhutani.

3. Pembukaan lahan Program PHBM

Setelah LMDH dan Perhutani mencapai sepakat *sharing* dilanjutkan dengan pendataan dan pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilkoordinasi oleh regu LMDH dan didampingi oleh Mantri dan Mandor Perhutani RPH Munjungan Timur untuk memisahkan antara lahan produksi dan hutan lindung. Pembukaan lahan tersebut cukup sulit untuk menemukan luasan yang adil karena harus memperhatikan luas lahan setiap bagian anggota LMDH. Kesulitan tersebut dirasakan oleh bapak B yang pada saat itu menjadi regu LMDH. Luasan masing-masing anggota bisa berbeda karena terbatasnya lahan yang diperuntukkan sebagai lahan hutan produksi. Sehingga harus mengambil sebagian hutan lindung.

Setelah masyarakat anggota LMDH membuka lahan yang lokainya sudah dikoordinir oleh regu LMDH dengan didanpingi Perhutani, maka dilanjutkan dengan pendataan luas lahan. Pendataan luas lahan oleh LMDH akan digunakan sebagai lampiran berkas untuk pengajuan administrasi dan akta notaris LMDH. Supaya sah secara hukum dan administrasi mengelola hutan bersama perhutani yang bertujuan menjaga kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Pada pelaksanaanya LMDH diharapkan tidak hanya sebagai wadah izin pengelolaan hutan semata. Namun harus berkembang dengan kegiatan produktif lainnya seperti membangun usaha mandiri. Pengurus LMDH diberi pelajaran tentang bagaimana membangun usaha mandiri dalam bentuk koperasi, supaya tidak hanya bergantung pada sumber daya hutan semata. Pengurus LMDH seperti Pak R dibekali pengetahuan dan pelatihan seperti pengelolaan koperasi, pengembangan pertanian dan peternakan. Pembekalan kepada anggota LMDH sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia, supaya anggota LMDH nantinya tidak hanya bergantung pada hasil mengelola hutan semata tetapi juga dari sektor lain.

Pada saat penelitian dilakukan LMDH Rimba Makmur memiliki badan hukum dengan Nomor AHU-0004661.AH.01.07.Tahun 2017, disahkan dengan istilah Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rimba Makmur Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Pemanfaat sumber daya hutan dengan sistem kolaboratif seperti yang dijalankan Perhutani bersama LMDH Rimba Makmur akan menguntungkan kedua belah pihak. Jika Perhutani serius membina, mendampingi dan memfasilitasi anggota LMDH Rimba Makmur supaya berdaya dan memiliki kemandirian baik secara individu maupun kelembagaan. Dampak dari

keberdayaan masyarakat nantinya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga, kapasitas sumber daya manusi dan kelestarian lingkungan.

Setelah melalui banyak tahapan mulai dari sosialisasi sampai pelatihan pengurus dan anggota maka terbentuklah LMDH Rimba Makmur dengan akses lahan konsesi seluas 696,7 ha dan anggota LMDH rata-rata mengelola lahan seluas 0,125 ha. **Tabel. 4.5** merupakan gambaran struktur lahan garapan milik anggota LMDH Rimba Makmur.

Tabel 4.5 Luas Rata-Rata Lahan Garapan

Luas lahan (ha)	Anggota (KK)	Persentase (%)
0,125	208	39,92
0,0625	114	21,88
0,25	173	33,21
0,50	14	2,69
0,225	2	0,38
0,75	7	1,34
1	2	0,38
1,5	1	0,19
Jumlah	521	100

Sumber: Olah data pribadi dari buku Gabungan Hasil Inventarisasi NKL 2017

Dari hasil inventarisasi NKL Tahun 2017 tercatat jenis tanaman yang ditanam masyarakat antara lain sebagaimana dijelaskan pada **table. 4.6** tetapi mayoritas adalah cengkeh dan kelapa berikut rinciannya:

Tabel. 4.6 Inventarisasi Tanaman LMDH Rimba Makmur

No	Jenis Tanaman	Petak	Produktif	Belum Produktif
1	Cengkeh	173	-	-
		186	1.488	1.175
		187	958	734
		181	75	76
		182	803	536
		183	183	141
2	Kelapa	187	60	82
		173	164	182
		182	77	58
3	Durian	-	70	-
4	Pucung	-	132	15
Jumlah total tanaman			6.994	

Sumber: Olah data pribadi dari buku Gabungan Hasil Inventarisasi NKL 2017

Dari **tabel. 4.6** ketahui bahwa tanaman mayoritas adalah tanaman cengkeh yang jumlah 6.169 pohon dengan rincian 3.507 pohon produktif dan 2.662 pohon belum produktif. Tanaman cengkeh inilah yang menjadi komoditas utama dan tumpuan hidup petani. Dari observasi yang dilakukan peneliti harga cengkeh pada 2018:

Tabel. 4.7 Harga Cengkeh 2014 dan 2018

Tahun	Kondisi	Harga (Rp/kg)
2014	Basah	35.000,00 - 50.000,00
	Kering	250.000,00 - 280.000,00
2018	Basah	23.000,00- 32.000,00
	Kering	90.000,00 - 130.000, 00

Sumber: Observasi peneliti

Meski mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, tidak heran ketika musim panen tiba petani penggarap (pesanggem) mendapatkan keuntungan yang cukup memadai untuk bisa hidup.

Pada realitanya di lapangan LMDH Rimba Makmur tidak berjalan efektif. Maksud dari efektif pada penelitian ini yaitu hasil dari sosialisasi yang dilakukan

oleh Perhutani kepada anggota LMDH seperti aturan PHBM, pengembangan kelembagaan melalui pelatihan koperasi, pertanian dan perkebunan tidak tersebar dengan merata kepada seluruh anggota LMDH. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya transfer pengetahuan antar anggota LMDH. Selain itu, anggota LMDH juga tidak begitu peduli dengan LMDH karena yang mereka pedulikan hanya bisa menggrap hutan dengan mudah dan mengikuti aturan bagi hasil semata.

LMDH Rimba Makmur sedang mengalami berbagai kendala seperti minimnya pendapatan lembaga, jarang diadakanya sosialisasi dan transparansi dana. Minimnya pendapatan lembaga dari hasil *sharing* tidak dibarengi dengan adanya badan usaha yang dapat dikembangkan oleh lembaga untuk mendukung peningkatan pendapatan LMDH. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya pendapatan lembaga selain hasil *sharing* tanaman dan tidak adanya unit usaha yang dimiliki. Sedangkan pernyataan tentang tidak adanya transparansi disampaikan oleh Pak B yang dulunya pernah menerima hibah berupa hewan ternak dari ketua LMDH. Hewan ternak yang diterima Pak B pada saat itu berharga 1 juta dan Pak B harus mengembalikan uang sebesar Rp. 800.000,00. Alasan dari kebijakan pengembalian uang tersebut menurut Pak B sebagai uang tabungan tetapi sampai sekarang uang tabungan tersebut belum ada kejelasan.

Selain masalah transparansi, LMDH Rimba Makmur juga mengalami kendala pemasukan bagi hasil *sharing*. Minimnya pendapatan LMDH juga dipengaruhi adanya bagi hasil dengan instansi dan aparat pemerintahan setempat.

Proses dan adanya pembagian hasil *sharing* akan dijelaskan oleh Pak R:

Separo Perhutani separe LMDH, urung kepotong sinder sak anak buahe mantri, daerah lingkup Kecamatan ngangklopi, deso ngangklopi. Sidane engko bageane LMDH seng khusus mlebu teng mriku, ngeh kebagean. Kebageono yo namung, krono opo mas? Nek manut peritungan neng kono,

upamane ngono kuwi lek nang Kecamatan, pamane nek kono karek bagean 300 nyang 400 po yo layak mas? Pomone deso mek bagean 500 po yo layak mas? Senajan deso oleh kadang-kadang mboh 50 nang 100 kan ngangklop. Iki engko umpamane nang koramil lan pribadi-pribadi kadang-kadang jan jaluk. Nyatu seng oleh kiro-kiroe komendane-komendane termasuk camat.

(Setengah untuk Perhutani setengah untuk LMDH, belum dikurangi sinder beserta anak buahnya mantri, memberi pihak daerah lingkup Kecamatan Munjungan, pihak Desa Tawing. Jadi nantinya pemasukan LMDH yang masuk ke situ. Dari pembagian hasil *sharing* LMDH hanya mendapat sedikit pemasukan, karena apa mas? Jika mengikuti perhitungan aslinya, misal jika ke Kecamatan hanya mendapat 300 sampai 400 apa layak mas? Pihak Desa Tawing hanya sebagian 500 apa pantas mas? Meskipun desa dapat entah 50 sampai 100kan juga memberi kepada perangkat desanya. Ini nanti misal ke koramil, kadang pribadi-pribadi (oknum tentara) juga memang minta. Mungkin yang dapat mungkin hanya komandanya saja termasuk camat. (Wawancara pada 23 Juni 2018).

Banyaknya potongan dari pejabat Perhutani maupun pejabat pemerintahan membuat sumbangan LMDH kepada kas/pemasukan Desa dan Kecamatan untuk pembangunan menjadi minim. Sehingga secara finansial LMDH Rimba Makmur sulit untuk berkembang menuju lembaga yang mandiri.

Secara umum program PHBM memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Dampak positif tersebut muncul karena masyarakat dapat mengelola hutan dengan leluasa meskipun masih ada kendala pada penyelenggaraanya, berikut pernyataan Pak K:

Berbicara capaian. Pertama, berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, berhasil, meredakan konflik kehutanan antara Perhutani dan Masyarakat. Kalau yang belum berhasil tujuan hutan lestari belum tercapai, belum berhasil lagi dalam meningkatkan usaha produktif dan pembangunan sumber daya manusia masyarakat desa hutan (Wawancara pada 1 Juni 2018).

Berbeda dengan masa Orde Baru dan masa program *bespel*. Pada saat itu masyarakat untuk menikmati hasil hutan harus dengan cara mencuri tetapi untuk saat ini masyarakat sudah dapat memanfaatkan hutan dengan leluasa. Diakui oleh pihak Perhutani bahwa *illegal logging* belum dapat dihentikan secara penuh, pengelolaan hutan lestari juga belum bisa dicapai karena masih adanya penebangan kayu oleh

masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas dan usaha dalam sektor pengelolaan hutan juga belum dapat dicapai karena minimnya anggaran dan kapasitas sumber daya manusia anggota Perhutani yang kurang memadai. Sehingga tujuan dari program PHBM untuk membina masyarakat masyarakat belum dapat tercapai.

4.3 Gambaran Informan

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Adapun nama-nama informan dalam penelitian ini, sudah peneliti samarkan dengan pertimbangan keamanan, privasi informan dan pertimbangan etika penelitian. Maka informan yang dipilih dalam peneliti ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bapak R

Pak R sebagai Ketua LMDH Rimba Makmur dan juga sebagai penggarap lahan Program PHBM. Beliau menjadi anggota LMDH sejak Tahun 2006 dan mengikuti proses sebelum sampai berdirinya LMDH. Sebelum menjabat sebagai ketua LMDH beliau menjadi pengurus LMDH, saat ini beliau bertanggung jawab penuh kepada LMDH.

2. Bapak B

Pak B disini sebagai Kelompok Kerja sejak berdirinya LMDH dan beliau pernah menjabat sebagai ketua dua LMDH dikepengurusan yang dipimpin Pak Budi. Serta beliau juga sebagai regu pembukaan lahan *bespel* dan lahan LMDH. Pak B berperan sebagai informan yang mengetahui sejarah pengelolaan hutan di Desa Tawing, sejarah kepengurusan LMDH dan mengetahui alih kelola lahan pada anggota LMDH.

3. Bapak MJ

Pak MJ disini adalah seorang anggota LMDH Rimba Makmur yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Beliau adalah warga yang terlibat melakukan alih kelola lahan program PHBM karena faktor kebutuhan membangun rumah. Pak MJ dijadikan informan karena beliau mengetahui proses dan pertimbangan beliau saat alih kelola dengan warga Desa lain.

4. Bapak MR

Pak MR disini sebagai seorang anggota LMDH Rimba Makmur yang bekerja sebagai petani dan buruh tani. Beliau adalah warga yang terlibat melakukan alih kelola lahan sebanyak dua kali di lokasi lahan yang sama. Pak MR dijadikan informan yang terlibat alih kelola dengan sesama anggota LMDH.

5. Bapak WD

Pak WD adalah seorang anggota LMDH Rimba Makmur yang bekerja sebagai petani, nelayan, tukang, dan juga wiraswasta. Beliau adalah orang mendapatkan lahan dari hasil warisan orang tuanya. Beliau juga memiliki satu lahan garapan di wilayah LMDH desa lain, memiliki sawah, lahan lain di LMDH Rimba Makmur dan asset tanah lain. Beliau terlibat alih kelola karena produktivitas lahan menurun.

6. Pak KR

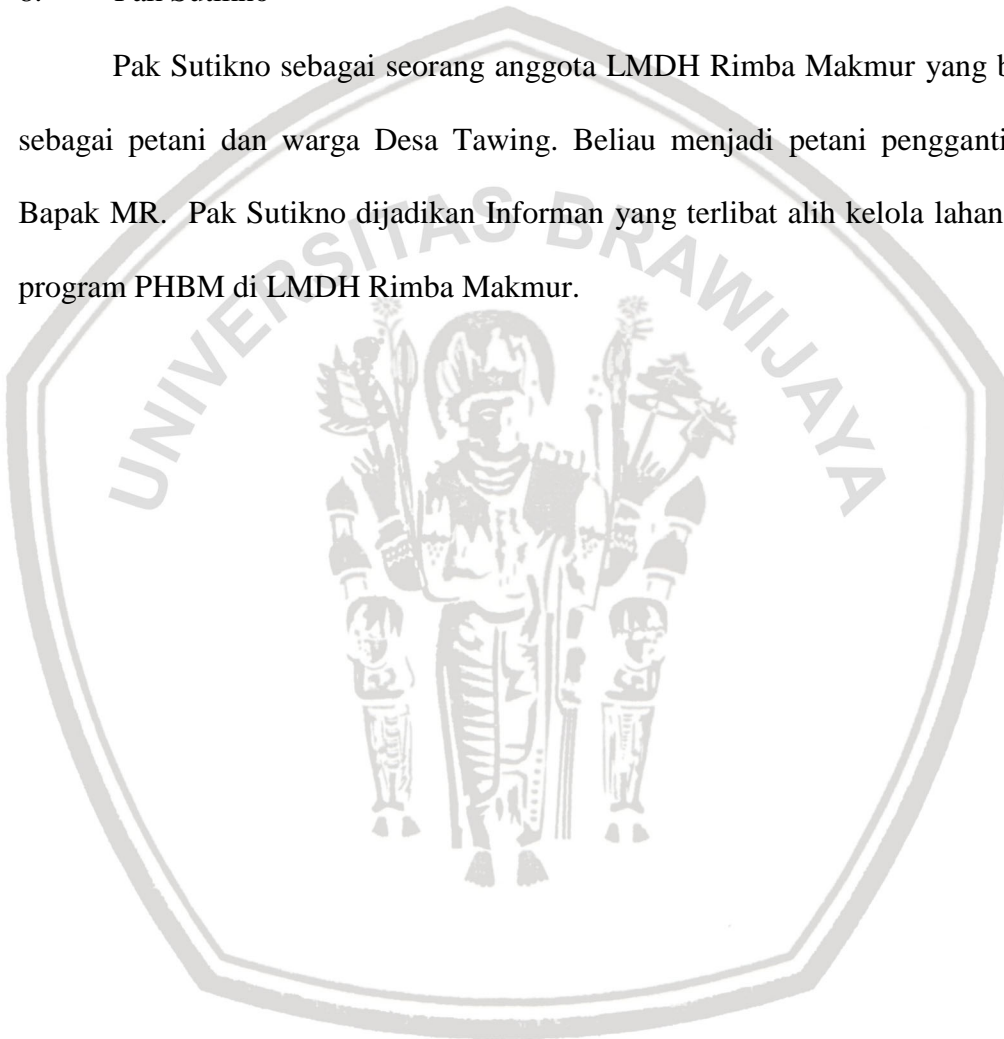
Pak KR adalah anggota LMDH Rimba Makmur yang bekerja sebagai petani dan peternak. Beliau mendapatkan lahan dari pemberian orang tuanya dan pembagian lahan PHBM. Pak KR berperan sebagai petani yang tidak terlibat alih kelola.

7. Pak K

Pak K disini adalah mantri Perhutani Pangkuan Munjungan Timur yang menaungi LMDH Rimba Makmur dan beliau juga warga Desa Tawing. Beliau dijadikan informan sebagai wakil dari pihak Perhutani yang dapat memberikan informasi dari sudut pandang Perhutani tentang alih kelola.

8. Pak Sutikno

Pak Sutikno sebagai seorang anggota LMDH Rimba Makmur yang bekerja sebagai petani dan warga Desa Tawing. Beliau menjadi petani pengganti lahan Bapak MR. Pak Sutikno dijadikan Informan yang terlibat alih kelola lahan obyek program PHBM di LMDH Rimba Makmur.



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Cara Mendapatkan Lahan Dan Dampak PHBM Pada LMDH Rimba

Makmur

Tersedianya lahan pertanian berupa lahan persawahan dan lahan hutan di Desa Tawing menjadi alasan masyarakat memilih profesi sebagai petani, baik menjadi petani sawah maupun petani hutan. Bagi petani desa, lahan merupakan sumber daya atau aset yang tidak dapat digantikan sebagai faktor utama penunjang produksi usaha pertanian. Petani di Desa Tawing mengelola lahan persawahan maupun lahan program PHBM digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk diperjual-belikan kepada orang lain.

Pada sejarah pengelolaan hutan di Desa Tawing pernah terjadi perselisihan antara Perhutani dan masyarakat yang disebabkan oleh penebangan tanaman hutan oleh masyarakat sekitar hutan. Lahan yang dimiliki Perhutani secara status adalah tanah negara, negara memberikan hak kelola kepada Perhutani sebagai BUMN yang berafiliasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mengelola hutan. Program PHBM memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Desa Tawing seperti aspek ekonomi melalui peningkatan ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, pendapatan desa dan tidak terkecuali pendapatan Perhutani.

Untuk dapat memanfaatkan lahan hutan konsesi program PHBM di Desa Tawing masyarakat sekitar hutan harus menjadi anggota LMDH Rimba Makmur. Pada dasarnya hanya anggota LMDH yang dapat mengelola hutan obyek PHBM, anggota LMDH mendapatkan lahan dari hasil *babat* (membuka lahan) pasca

sosialisasi program PHBM di balai Desa Tawing pada tahun 2006 antara masyarakat dan Perhutani tetapi untuk saat ini masyarakat mendapatkan lahan dari hasil warisan orang tuanya. Mengenai cara memperoleh lahan konsesi kepada anggota dijelaskan oleh Pak B:

Mbien kuwi asale babat, gerakan babat alas koyo tak omongne kuwi maeng lho. Dadi babat di koordinir regu seng ngedom perbagean,... Olehe bagean kuwi soko gerakan babat alas kuwi maeng lo... Lek wong saiki ngono olehe wes waris-waris ko bapak ane, ko mbahe ngono, penak wes ora ngrekoso. (Dulu itu asalnya membuka lahan, gotong royong membuka hutan seperti yang saya bilang tadi lho. Jadi membuka lahan dikoordinir regu,... Dapatnya lahan dari gotong royong membuka lahan tadi itu... Jika orang sekarang (penggarap) itu dapatnya dari warisan bapaknya, dari mbahnya, enak tidak capek) (Wawancara pada 8 Juni 2018).

Status lahan yang diperoleh oleh masyarakat anggota LMDH bukan sebagai hak milik melainkan sebagai hak pakai atau hanya untuk diambil manfaatnya melalui pengelolaan hasil bercocok tanam.

Dengan cara mengelola hutan bersama masyarakat Perhutani berharap dapat bersama-sama menjaga hutan dari tindakan pembalakan hutan, pengrusakan hutan dan meminimalisir konflik antara Perhutani dan masyarakat dalam mengelola hutan. Pengelolaan lahan merupakan cara petani untuk meningkatkan nilai ekonomis dari lahan yang dikelolanya. Hasil dari pengelolaan lahan digunakan petani untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak dan memiliki tabungan. Ketergantungan masyarakat yang kepada sektor pertanian dijelaskan oleh Pak MJ sebagai berikut:

Secara pribadi berdampak banget, lek ndak enek alas, lek wong Munjungan ndak mangan. Deloken ngene iki, cengkeh ndak panen sepi ora eneng opo-opo, ora eneng paweton yo ora eneng duwet jelase. (Secara pribadi berdampak sekali, kalau tidak ada hutan, kalau orang Munjungan tidak makan. Lihat saja sekarang ini, cengkeh tidak panen sepi tidak ada apa-apa, tidak ada hasil yang jelasnya tidak ada uang) (Wawancara 20 Mei 2018).

Ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan disebabkan karena masyarakat Desa Tawing mayoritas bekerja sebagai petani dengan komoditas utama tanaman cengkeh.

Seiring berjalanya waktu, pengelolaan lahan PHBM yang dilakukan oleh petani mengalami penurunan produktivitas yang berdampak pada pendapatan keluarga. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas petani adalah perubahan musim. Panen raya cengkeh pada 2014 merupakan panen raya terbesar dalam 5 Tahun terakhir. Seperti yang disampaikan Ibu Rum,

Enek, mbien kuwi mlebune anakku kuliah 2014, aku jek duwe simpenan 20.....Lek panen iki kiro-kiro yo mung oleh 7 ewu. Ora okeh wohe, ora koyo mbien (Ada, dulu itu waktu anak saya masuk kuliah 2014, saya masih punya tabungan 20 juta... Panen sekarang kira-kira hanya 7 juta, tidak banyak seperti dahulu) (Wawancara pada 2 Mei 2018).

Penurunan produktivitas lahan disebabkan perubahan musim dari musim penghujan ke musim kemarau dan juga sebaliknya. Adanya perubahan musim menyebabkan pohon cengkeh menjadi gagal berbuah. Selain itu sulitnya menam bibit cengkeh dan kondisi cengkeh dalam keadaan sudah berumur tua menjadi sebabnya, sedangkan tanaman selain cengkeh seperti pisang, kelapa harganya cukup rendah di pasaran.

Adanya perubahan musim yang menyebabkan produktivitas lahan menurun menjadi salah satu sebab petani melakukan tindakan alih kelola lahan. Tindakan alih kelola lahan dilakukan petani sebagai upaya petani anggota LMDH mencapai tujuannya dengan menggunakan lahan garapan yang dimilikinya. Petani anggota LMDH melakukan tindakan alih kelola karena hasil pertanian dianggap sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan yang bersifat mendadak untuk keperluan seperti membangun rumah, mensekolahkan anak, investasi ke sektor lain dan membeli kendaraan.

Adanya kasus alih kelola dengan istilah uang “*ganti rugi ongkos babat*” dapat dilihat dari cara memperoleh lahan. Ada tiga cara petani LMDH mendapatkan lahan; *pertama*, hasil *babat* (membuka lahan), masyarakat yang memperoleh dari hasil ikut membuka lahan seperti keterangan Pak MJ:

Lek wong jenenge ora di dol ngono lo yu, jenenge ganti rugi ale nyambut gawe ae babat.

(Kalau orang namanya bukan dijuak gitu lo yu, namanya ganti rugi buat buat kerja membuka dulu) (Wawancara 20 Mei 2018).

Ganti rugi merupakan cara petani memaksimalan hasil dari kontrol atas sumber daya lahan yang dimilikinya. Petani melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan dan menyelamatkan asset keluarga. Pemindah tanganan hak kelola lahan ke orang lain yang bukan keturunan atau sanak saudara anggap tidak menguntungkan dan membuat aktor merugi maka muncullah istilah transaksi ganti rugi sebagai pilihan rasional, sesuai yang disampaikan Pak WD:

Alih kelola, ganti ongkos ngopeni, nandur karo ngijoli bibit, penak men nek gratisan.

(Alih kelola sebagai ongkos memelihara, menanam bibit, enak sekali jika gratis) (Wawancara pada 6 juni 2018).

Kedua, petani memperoleh lahan dari hasil warisan. Sistem warisan dilakukan oleh orang tua petani yang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ditemukan petani yang mengalihkan sebagian hak pengelolaan lahan kepada anaknya yang sudah berumah tangga sebagai sumber pendapatan keluarga anaknya seperti Pak B yang memberikan sebagian lahannya untuk Pak KR. Begitu pula pewarisan lahan PHBM pasca orang tua meninggal, lahan PHBM tidak luput dari obyek pewarisan meskipun berstatus bukan hak milik pribadi tetapi masyarakat menggapnya sebagai asset milik keluarga. Petani yang mendapatkan lahan dengan sistem waris umumnya tidak mengetahui aturan dan sistematika program PHBM kecuali *sharing* hasil buah.

Ketiga, hasil alih kelola lahan. Petani yang mendapatkan lahan hasil alih kelola lahan umumnya juga tidak mengetahui aturan dan tujuan inti dari program PHBM. Ketidaktahuan petani pengganti dari hasil penelitian disebabkan karena petani/jarang bahkan tidak pernah dilibatkan rapat maupun sosialisasi karena kedua kegiatan tersebut dilakukan hanya oleh pengurus dan pengawas LMDH dari Perhutani. Sehingga, tidak heran jika anggota LMDH lama, pengelola pengganti maupun pengelola dari hasil waris lebih memikirkan akumulasi modal dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari lahan PHBM dengan cara menanam maupu hasil alih kelola. Sebab ketidaktahuan petani atas aturan dan tujuan PHBM karena tidak adanya sosialisasi intensif maupun berkala dari LMDH Rimba Makmur maupun Perhutani sebagai tugas pembinaan dan pengawasan.

Jika dilihat dari hasil pengelolaan lahan sumber daya hutan sebenarnya cukup mengiurkan dan tidak heran jika menarik perhatian aktor lain. Hal tersebut dapat dilihat pada **tabel. 5.1** data hasil perkebunan Desa Tawing Tahun 2015.

Tabel. 5.1 Hasil Perkebunan dan Jenis Komoditas

Jenis Komoditas	Luas (ha)	Hasil (Ton/ha)	Nilai Produksi (Rp/ha)	Biaya Pupuk (Rp)	Biaya Bibit (Rp)	Biaya Lain-Lain (Rp)	Hasil Pemasaran (Rp/Thn)
1. Kelapa	101	180	361.600.000	-	-	15.000.000	48.600.000
2. Cengkeh	308	4.5	540.000.000	19.000.000	3.000.000	30.000.000	488.000.000

Sumber: Profil Desa Tawing 2015

Produk cengkeh dan kelapa menjadi komoditas unggulan petani di Desa Tawing, tanaman cengkeh sebagian besar ditanam petani di lahan obyek PHBM. Hasil dari pengelolaan hutan cukup mengiurkan bagi para petani dan berdampak pada pendapatan keluarga seperti memenuhi kebutuhan pokok, menyekolahkan anaknya,

membeli kendaraan bermotor dan membangun rumah. Pengelolaan lahan PHBM cukup menjadi daya tarik untuk investasi maupun dijadikan sebagai pekerjaan; pekerjaan utama atau pekerjaan tambahan oleh petani.

Dibalik mengiurkannya hasil hutan tersebut terjadi tindakan pengalihan kelolaan lahan obyek PHBM dengan istilah “*uang ganti rugi ongkos babat*” oleh anggota LMDH Rimba Makmur yang membutuhkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Usaha yang dilakukan oleh petani adalah upaya rasional yang sudah melalui eliminasi-eliminasi dari pilihan yang ada dan sampai pada akhirnya menemukan keputusan melepas lahan sebagai usaha yang dianggap paling rasional untuk mencapai kepentingannya. Mungkin menurut sebagian orang usaha ini bukanlah usaha yang rasional jika dilihat dari nilai hasil hutan yang telah dipaparkan tetapi menurut petani selaku aktor usaha inilah yang dianggap paling rasional untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

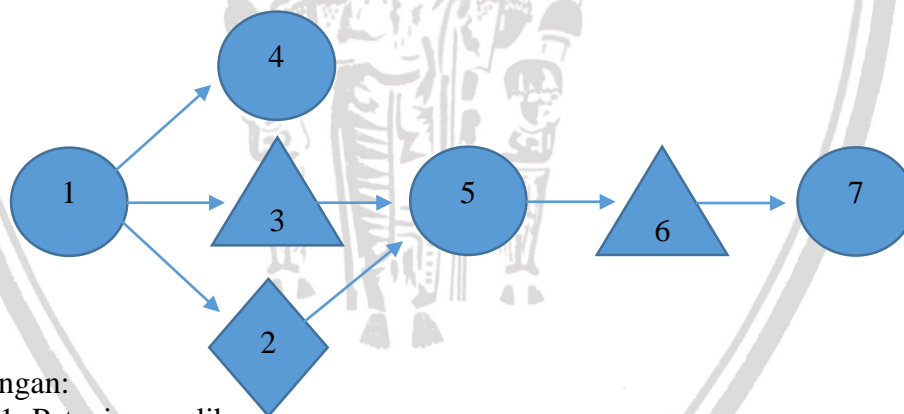
5.2 Alih kelola lahan PHBM dalam Perspektif James Coleman

Adanya tindakan alih kelola lahan program PHBM yang dilakukan oleh petani anggota LMDH didasari oleh berbagai alasan seperti kebutuhan mendesak, keperluan keluarga dan menurunnya produktivitas lahan. Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Khususiyah (2013: 527) lahan PHBM yang dikonsesikan kepada petani menurut aturan PHBM tidak boleh dipindah tangankan. Larangan tersebut bukan tidak beralasan karena dengan adanya tindakan alih kelola lahan akan membuat masyarakat yang miskin tidak dapat mengelola lahan kembali dan tidak dapat mendapatkan penghasilan dari program PHBM.

Sebagai tambahan, Khususiyah (2013: 527) juga menjelaskan bahwa tindakan alih kelola atau pemindah tanganan lahan obyek PHBM dapat

menyebabkan pengurangan pendapatan keluarga dan pengelola pengganti kurang mengetahui aturan-aturan program PHBM. Pengalih kelolaan lahan juga dianggap lebih menguntungkan pihak yang memiliki modal finansial yang memumpuni.

Tindakan alih kelola lahan obyek program PHBM yang dilakukan oleh anggota LMDH tidak akan mungkin terjadi begitu saja tanpa adanya kepentingan maupun tujuan yang hendak dicapai oleh petani. Alih kelola dilihat sebagai usaha rasional yang dilakukan petani anggota LMDH Rimba Makmur untuk merealisasikan kepentingannya karena hubungan antara petani dan lahan ialah kuasa dan kepentingan (Coleman, 2011:37). Pada transaksi alih kelola lahan PHBM, petani anggota LMDH membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan petani pengganti tertarik untuk memiliki dan mengelola lahan PHBM. Adapun contoh transaksi alih kelola lahan PHBM seperti yang terjadi antara Pak WD kepada Pak Bonijo sebagaimana tersaji pada **gambar 5.1**.



Keterangan:

- 1: Petani pengalih
- 2: Keluarga
- 3: Tetangga lahan
- 4: Masyarakat umum
- 5 dan 6: Orang yang mendapat informasi dari pihak lain
- 7: Petani Pengganti

Gambar 5.1 Proses Transaksi Alih Kelola Lahan Obyek PHBM Antara Pak WD dan Pak Bonijo.

Sumber: Olah data wawancara dan observasi

Pak WD (1) merupakan petani pengelola lahan yang mendapatkan lahan dari hasil warisan orang tuanya seluas 0,125 ha. Di atas lahan tersebut terdapat 5 pohon cengkeh dengan status produktif dan 7 pohon berstatus tidak produktif. Pada dasarnya Pak WD sudah mengelola lahan secara maksimal seperti pemupukan dan peremajaan bibit. Namun pada kenyataannya hasil dari mengelola lahan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya meskipun sudah dikelola dengan maksimal. Pak WD melepas lahanya karena menganggap lahan yang dimilikinya sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya karena hasil dari pengelolaan lahan dari tahun-ketahun mengalami penurunan dan lahan pun sulit untuk ditanamani bibit kembali. Dengan memanfaatkan situasi mendekati musim panen cengkeh Pak WD melepas hak kelola kepada Pak Bonijo (7) untuk menaikkan nominal uang ganti rugi lahan. Perhitungan yang dilakukan Pak WD alih kelola untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sebagai berikut:

Pertimbangane, awake wes kesel, garap sawah, garap neng ngampiran, garap neng pucung-pucung, neng mason-mason, neng gentungan, gek saiki yo nang segoro barang, kadang yo nyumbati kambil. Tak itung, tak piker-pikir seng di dol kuwi kudu seng neng gunturan wes jurang gek koyo ora tek apik nemen timbang liyane. Perhitunganku ngene? Duwet sak munu 75 lek tak bank ne, koperasi sak wulane aku oleh 600 ewu kuwi leyeh-leyeh karo merem penak ta. Kuwi itung-itungane wong bisnis. Yo ngono kuwi saiki mikire kudu bisnis. (Petimbangannya, badanya sudah capek juga, mengelola sawah, mengelola yang di Ngampiran, mengelola di Pucung-Pucung, di mason-mason itu, di Gentungan, kemudian sekarang juga melaut, kadang juga mengupas kelapa. Saya hitung, saya piker-pikir yang dijual itu harus yang di gunturan konturnya sudah jurang dan kalau panen juga kurang baik dari pada yang lain. Perhitunganku begini? Uang 75 juta jika saya masukkan ke bank koperasi satu bulanya saya dapat 600 ribu itu tenang-tenang. Itu hitung-hitunganya orang bisnis, ya sekarang itu mikirnya harus bisnis) (wawancara pada 6 Juni 2018).

Tindakan melakukan alih kelola lahan yang dilakukan oleh Pak WD sebagai usaha pengamanan aset perekonomian keluarga dari kerugian mengelola lahan danantisipasi turunnya uang ganti rugi lahan di waktu mendatang. Sebelum melakukan

tindakan penyelamatan asset Pak WD telah melalui seleksi dan pertimbangan dari beberapa pilihan yang ada seperti pertimbangan banyaknya pekerjaan, kontur lokasi lahan dan produktivitas lahan di masing-masing lokasi. Sehingga pada akhirnya Pak WD memilih melepas lahan di lokasi gunturan sebagai keputusan paling Rasional untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Proses alih kelola seperti pada **gambar 5.1**, diawali Pak WD (1) menawarkan lahanya kepada keluarga terdekatnya seperti Pak Pan (2) selaku kakak kandung dan (2) Pak Kus selaku kakak Iparnya. Setelah ditawari lahan garapan kedua kerabat Pak WD tidak ada yang berminat dengan alasan seperti tidak punya uang. Jalan lain yang ditempuh Pak WD setelah menawarkan ke keluarganya adalah menawarkan kepada tetangga lahan garapan seperti Pak Bag (3) dengan harapan mau membeli dengan pertimbangan satu lokasi lahan, posisi lahan Pak Bag lokasinya tepat di sebelah timurnya lahan Pak WD. Penawaran keduanya tersebut juga belum membuahkan hasil karena tidak ada yang memberikan respon pasca ditawari.

Informasi penawaran lahan ternyata sampai pada adiknya Pak Bonijo yaitu lek Mif (6) dan bertemu Pak WD pada saat di sawah, pertemuan tersebut membicarakan informasi tentang lahan yang akan dialih kelolakan oleh Pak WD mulai dari harga sampai tanaman dan informasi tentang lahan didapat lek Mif dari Pak Bie (5) yang merupakan keluarga dari Pak Bonijo dan lek Mif. Setelah ditelusuri Pak Bie mendapatkan informasi dari Pak Bag dan Pak Kus yang merupakan tetangga dan temannya. Ganti rugi yang ditawarkan oleh Pak WD pada awalnya sebesar 95 juta tetapi setelah melalui proses tawar menawar di rumah Pak WD menemukan angka kesepakatan 75 juta. Sebelumnya tentang informasi adanya lahan yang alih kelolakan telah disampaikan lek Mif kepada Pak Bonijo yang posisinya

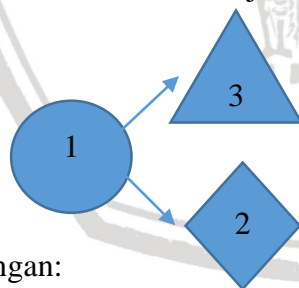
saat itu di Malaysia, komunikasi tentang harga dan hasil negosiasi juga terus dikomunikasikan antara Pak Bonijo dan lek Mif yang pada akhirnya menemukan kesepakatan ganti rugi lahan 75 juta. Posisi lek Mif pada proses alih kelola lahan ini sebagai wakil dari Pak Bonijo. Sesudah adanya angka kesepakatan ganti rugi antara Pak WD dan lek Mif dilanjutkan dengan serah terima. Serah terima yang dilakukan pada alih kelola lahan ini didasari oleh kepercayaan, suka sama suka dan tidak adanya bukti tertulis antara kedua belah pihak.



Gambar 5.2 Lokasi Alih Kelola Lahan Pak WD

Sumber: Dokumentasi pribadi

Adapun tindakan alih kelola lahan PHBM juga dilakukan oleh Pak MR kepada Pak Sutikno, lebih jelaskan akan disajikan pada **Gambar. 5.3**.



Keterangan:

- 1: Petani pengalih
- 2: Orang yang ditawari
- 3: Petani pengganti

Gambar. 5.3 Proses alih kelola lahan yang dilakuan oleh Pak MR dan Pak Sutikno (Sumber: Olah data wawancara).

Pak MR (1) adalah petani yang mendapatkan lahan dari hasil babat dengan luas 0,25 ha. Pak MR melakukan alih kelola lahan untuk keperluan membelikan mobil anaknya. Hasil dari pengelolaan lahan yang selama ini beliau kerjakan hanya bersifat pas-pasan untuk perekonomian keluarga membuat Pak MR mengalihkan sebagian dari lahanya. Sebagai keluarga tani yang berpenghasilan pas-pasan dan membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk membelikan anaknya mobil, Pak MR juga tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membeli mobil. Maka menurutnya salah satu keputusan yang tepat untuk Pak MR lakukan adalah mengalih kelolakan lahan untuk mendapatkan uang ganti rugi mengelola lahan, berikut penjelasannya,

Lek wong deso butuh duwet cepet yo dodolan.

(Kalau orang desa butuh uang cepat ya jualan) (Wawancara pada 2 Juni 2018).

Selain alasan kebutuhan dan tidak adanya tabungan, pertimbangan tentang minimnya minat menantunya pada sektor pertanian menjadi alasan. Dengan tindakan melepas sebagian lahan maka beliau dapat mencapai tujuan kepentingan keluarganya yaitu mendapatkan uang ganti rugi, serta pertimbangan matang telah dikonsultasikan bersama keluarganya seperti resiko alih kelola terutama kepada anaknya. Berikut penjelasannya:

Koyoke bocah-bocah kuwi yo ora eneng seng gelem dadi tani, wonge yo saiki pileh ngopeni selipe neng Bangun. Yo piye eneh kuwi mbien tak omongi neng bageanmu seng tak jupuk, ..., jereke iyo yo, di dol.

(Kelihatanya anak-anak itu, tidak ada yang berminat menjadi petani. Orangnya sekarang juga lebih memilih mengelola gilinganya di Desa Bangun. Ya mau bagaimana lagi, dulu sudah saya bilang kalau itu diambilkan dari bagianmu yang saya ambil.... Katanya iya) (wawancara pada 2 Juni 2018).

Meskipun Pak MR menjual lahannya tetapi beliau masih bisa mengelola hasil hutan karena lahan yang dilepas hanya sebagian yaitu seper tiga dari luas lahan garapanya dan Pak MR juga masih memiliki lahan di lokasi lain, tepatnya di gunturan. Profesi

lain yang dijalani Pak MR adalah buruh tani hutan, sehingga pendapatan ekonomi keluarga Pak MR bergantung pada sumber daya hutan.

Pada proses alih kelola lahan seperti **gambar. 5.3** antara Pak MR (1) dan Pak Sutikno (3). Pak Sutikno adalah teman sekaligus orang yang mempekerjakan Pak MR untuk merawat dan membersihkan lahannya. Proses penawaran lahan kepada Pak Sutikno oleh Pak MR dimulai ketika beliau datang ke rumah Pak MR untuk mengantarkan upah membersihkan lahan. Pada saat itulah beliau di tawari untuk membeli lahan dengan nominal ganti rugi 90 juta. Penawaran ganti rugi 90 juta tersebut direspon Pak Sutikno dengan cara menawar dan melakukan perundingan dengan keluarga Pak Sutikno.

Selama proses negosiasi antara Pak MR dan Pak Sutikno, Pak Sutikno melakukan perhitungan uang ganti rugi dengan melibatkan anggota keluarga yaitu istrinya. Peran anggota keluarga sangat penting dalam setiap tindakan yang diambil seseorang karena setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan keluarga secara langsung maupun tidak langsung. Begitu juga yang dilakukan Pak Sutikno dengan melibatkan istrinya pada saat ditawarkan lahan oleh Pak MR;

Yo tak piker-pikir tak omongne mbi wong wedok. Sidane yo tak tuku kuwi.

(Ya saya piker-pikir dan saya juga bilang dengan istri, jadinya ya saya beli tadi) (Wawancara 12 Juni 2018).

Peran istri dalam keluarga bisa sangat menentukan keputusan khususnya keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Hal tersebut karena istri memegang peran sebagai manajer keuangan keluarga. Peran istri dalam pengambilan keputusan akan lebih besar jika istri turut memiliki pekerjaan dan menyumbang pendapatan keluarga. Meskipun selama ini pendapatan istri dianggap sebagai pendapatan tambahan keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua pendapatan dalam

keluarga akan digunakan untuk kepentingan bersama tanpa membedakan kepemilikan uang. Peran istri dalam keluarga juga menentukan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan asset keluarga yang dilakukan oleh suami, istri menjadi penyeimbang kestabilan perekonomian keluarga melalui pengaturan pemasukan dan pengeluaran rumah tangga. Dalam fenomena ini istri dari Pak Sutikno juga ikut dalam usaha pertanian yang keluarga guluti dan sebagai manajer keuangan keluarga. Sehingga posisi istri Pak Sutikno sangat menentukan keputusan membeli lahan dari Pak MR karena melibatkan jumlah uang yang cukup besar yaitu 78 juta.

Sebelum menemukan angka kesepakatan ganti rugi sebesar 78 juta dari penawaran awal 90 juta, pertimbangan yang dilakukan Pak Sutikno adalah pertimbangan untung-rugi dan tujuan yang hendak dicapai dalam transaksi alih kelola lahan PHBM. Secara sadar Pak Sutikno mengetahui bahwa lahan yang dikelolanya bukanlah lahan hak milik melainkan lahan untuk diambil manfaatnya. Dengan melihat pertimbangan pengelolaan hutan yang berkesinambungan setiap tahunnya menambah optimisme petani pengganti untuk semakin yakin bahwa lahan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dari modal yang dikeluarkannya. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Pak Sutikno:

Lek masalah sertifikatan jelas kuwi ndak sertifikatan tapi kan kenek digarap kawet mbien 2006 teko sakiki kan kenek di garap ta alas kuwi. Ora eneng masalah seng penteng awake ngene iki manut, jaluki sharing, yo manut..... Selain kuwi dak anu kae, kiro-kiro akhir tahun kae aku barang yo melok tanda tangan kontrak seng bermatrei seng isine garap alas selama 30 tahun, kuwikan apik ta isine, lek dipikir 30 tahun kuwi sampek waleh paleng garapku. Sakliyane ngono mas, tak delok cengkehe apik-apik karo lemah blok kono kuwi loh ngono lo, di tanduri kambel kenek cengkeh yo kenek. Sopo ngerti lek gosti Alloh ngijabahikan yo iso balekne duwet sak munu kuwi maeng. Pokoke intine kenek gae golek sandang pangan mas.

(Kalau masalah sertifikat jelas itu tidak bersertifikat tetapi bisa dikelola dari 2006 sampai sekarang dan bisa dikelolakan hutan itu. Tidak ada masalah yang

penting kita ini tataan atau nurut, diminta *sharing* ya taat, Selain itu, kira-kira akhir tahun kemarin, saya juga ikut tanda tangan kontrak bermaterai yang isinya bisa mengelola hutan selama 30 tahun, itu kan bagus isinya, jika dipikir 30 taun itu, mungkin sampai bosan saya mengelolanya. Selain itu mas, saya lihat cengkehnya juga bagus sama tanah disana itu tanahnya subur, ditanami kelapa bisa, cengkeh juga bisa. Siapa tahu jika Tuhan memberi ridhokan bisa mengembalikan uang segitu tadi. Pokok intinya bisa buat cari nafkah) (Wawancara pada 12 Juni 2018).

Adanya pengetahuan tentang rencana program Perhutanan Sosial membuat petani pengganti semakin optimis atas hasil ekonomi dari pengelolaan lahan. Selain itu, tujuan ekonomi yang dicapai dengan cara menukarkan sumber daya antara uang ganti rugi dengan lahan, dianggap Pak Sutikno dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Upaya mengelola lahan lahan yang dilakukan Pak Sutikno merupakan upaya rasional karena untuk mewujudkan keinginan atau tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Terjadinya transaksi pertukaran sumber daya antara antara Pak MR dan Pak Sutikno telah menggambarkan kesadaran aktor bahwa sumber daya yang diinginkanya berada pada aktor lain. Sehingga petani untuk mencapai tujuan atau kepentingan dapat memanfaatkan modal yang dimilikinya seperti pengetahuan, jaringan dan modal kapital untuk mendukung tindakan dan kepentingannya.

Hampir sama yang terjadi pada Pak MJ, Pak MJ melakukan tindakan dengan tujuan mendapatkan uang untuk membangun rumah. Sebelumnya Pak MJ sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan tentang asset mana yang harus dilepas untuk mencukupi dana membangun rumah yang masih kurang berikut adalah penjelasanya:

Ibarate lek wong tuwek ke lek omah kukuh kuwi marem. Pas bangun omah duwite kurang, ..., ora ko luar negri gek duwet ko ndi, mak e nek omah, Harji yo jek nyukuhan, aku dewe yo wes ndak nyang segoro, meng ngingu wedos karo nyang sawah, sawahe sakiki yo ora kenek di garap ora enek udan.

(Kalo orang tua itu kalo rumahnya kuat itu sudah bahagia. Waktu bangun rumah itulah, ternyata uangnya kurang. ... Tidak dari luar negeri terus uang dari mana? Ibuknya dirumah, Harji masih honorer, saya sendiri juga sudah tidak melaut. Cuma memelihara kambing sama ke sawah. Sawahnya sekarang tidak bisa dikelola karena tidak ada hujan) (Wawancara 20 Mei 2018).

Pilihan mengalih kelolakan lahan PHBM diantara asset lahan lain merupakan seleksi dan pertimbangan yang matang, sebenarnya Pak MJ memiliki lahan lain yang sedang dikerjakan berupa persawahan, lahan dilokasi lain, hutan. Selain itu, pendapatan dari hasil bertani dan berternak kambing yang dilakukan tidak mencukupi untuk membangun rumah sampai selesai. Sehingga pertimbangan memilih menggunakan asset lahan untuk dialih hak kelola merupakan pilihan yang dianggap paling rasional untuk mendapatkan uang cepat.



Gambar 5.4 Lokasi Lahan Alih Kelola Pak MJ
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari fenomena alih kelola lahan PHBM adanya tindakan alih kelola juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan negara yang kurang berpihak kepada petani. Adanya usaha dari Pak MJ dan Pak WD untuk tidak memasukkan anaknya ke sektor pertanian karena sektor pertanian tidak menjamin masa depan anaknya. Kata-kata yang dituturkan Pak MJ saat observasi adalah “*ngono ae kok diturunke*” artinya begitu saja kok diwariskan, secara tersirat dari pernyataan tersebut Pak MJ tidak menginginkan anaknya menjadi petani. Adanya harapan tersebut secara umum

bukan tanpa alasan, dari hasil observasi penelitian yang telah dilakukan sektor pertanian tidak ramah dengan petani, musim panen awal tahun 2018 saat petani di Desa Tawing melakukan panen tetapi negara melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand (lebih lengkapnya baca laman Republika.com pada 13 Januari 2018) dan begitu juga menurut petani pada saat panen cengkeh datang ada pasokan cengkeh dari ambon masuk ke gudang garam. Kedua peristiwa tersebut membuat harga komoditas pertanian jatuh dan tidak adanya kontrol dari pemerintah baik harga maupun pupuk membuat situasi pertanian semakin tidak menguntungkan untuk usaha pertanian dan hanya kerja keras tanpa hasil yang memampuni untuk keluarga petani. Selain itu, petani dalam struktur sosial masyarakat pedesaan berada dalam struktur sosial bawah, di bawah pegawai negeri sipil dan pekerja swasta. Situasi seperti itulah, saat ini yang terjadi pada masyarakat di wilayah Desa Tawing seperti yang dihadapi Pak MJ dan Pak WD.

Dari ketiga fenomena alih kelola lahan PHBM yang dilakukan petani anggota LMDH dalam praktiknya menggunakan jaringan sosial untuk menawarkan lahannya seperti tetangga, saudara, teman dan sampai menemukan petani pengganti. Pengguna modal jaringan terus berkembang sampai pada akhirnya menemukan aktor yang sekiranya tepat dan menyetujui negosiasi harga. Informasi tentang pelepasan lahan bisa berasal bukan dari aktor utama melainkan aktor kedua, ketiga dan seterusnya yang mengetahui informasinya. Manfaat dari jaringan adalah promosi “mulut ke mulut”. Pemasaran “mulut-kemulut” merupakan pemasaran yang cukup membantu aktor petani untuk menemukan aktor pengganti pengelola melalui bantuan aktor yang diberitahu (tetangga, teman, saudara). Penggunaan modal sosial yang berupa relasi sosial digunakan untuk memudahkan aktor-aktor melakukan

tindakanya (Coleman, 2011: 420). Modal sosial merupakan nanifestasi dari penerapan norma dan kepercayaan dalam masyarakat yang terus dijaga oleh aktor-aktor yang berkepentingan.

Pada transaksi alih kelola lahan PHBM ditemukan bahwa proses kesepakatan yang melibatkan petani pengalih dan petani pengganti berdasarkan nilai dan kepercayaan yang dibangun didalamnya dengan dasar kesepakatan. Kesepakatan transaksi alih kelola lahan tanpa adanya surat perjanjian alih kelola, namun didasari oleh rasa saling percaya dan suka sama suka antara kedua belah pihak. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Sutikno selaku pengganti:

Halah wong deso ora dadak eneng surat-surat opo kuwi maeng, serah terima. Ora eneg mas ngono,ngonan kuwi, saling percoyo wisan, podo senenge, itung-itung iso ngewangi uwong seng kesusahan mas.

(Halah, orang desa tidak perlu surat-suratan apa itu tadi, serah terima. Tidak ada mas gitu-gituan, saling percaya sudah. Sama senagnya. Hitung-hitung bisa membantu kesusahan orang) (Wawancara pada 12 Juni 2018).

Dalam pelaksanaan transaksi pengalih tidak menggunakan surat perjanjian alih kelola alih kelola seperti pada transaksi hukum postif barat. Tidak demikian halnya dengan transaksi alih kelola lahan PHBM di LMDH Rimba Makmur, anggota LMDH Rimba Makmur memiliki nilai kepercayaan tinggi satu sama lain atas tindakan yang dilakukanya. Selain itu, tindakan mengganti lahan merupakan upaya membantu orang lain yang sedang kesusahan. Pada dasarnya masyarakat pedesaan memiliki rasa percayaan satu sama lain sangat tinggi dan memiliki nilai gotong-royong yang masih terjaga dalam hubungan sehari-harinya, dalam hal ini adalah tindakan alih kelola. Kepercayaan yang terbangun antara pelepas dan pengganti tersebut memiliki kepentingan masing-masing terhadap sumber daya yang dipertukarkan (Coleman, 2011:130).

Selanjutnya ada peran sistem kultural yang mendukung tindakan alih kelola lahan PHBM. Secara kultural tindakan pengalih hak kelola lahan PHBM sudah menjadi rahasia umum dengan istilah “alih kelola dengan uang ganti rugi”. Tindakan alih kelola lahan PHBM tidak bisa dipersalahkan secara hukum karena dalam aturan surat perjanjian LMDH Rimba Makmur yang ditandatangani oleh anggota LMDH tertulis “tidak boleh diperjual-belikan”. Selain itu, tindakan alih kelola yang dilakukan oleh aktor lain terjadi di waktu sebelum-sebelumnya menjadi informasi dan pengetahuan petani anggota LMDH. Pengetahuan dan informasi tentang tindakan alih kelola lahan yang tidak adanya sanksi menjadi modal para aktor untuk melegitimasi tindakan yang dilakukan petani seperti yang terjadi pada Pak MJ dan Pak WD. Berikut penuturan Pak MJ yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada tindakan berupa sanksi maupun teguran dari LMDH maupun Perhutani:

Selama iki ora, aku delok wong-wong yo ora ke.

(Selama ini tidak ada, saya melihat orang-orang juga tidak ada itu)
(Wawancara 20 Mei 2018).

Pengetahuan yang direproduksi terus menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan dapat menjadi pengetahuan kolektif di masyarakat. Hasil dari pengetahuan kolektif tentang alih kelola lahan pada akhirnya menghasilkan tindakan alih kelola yang bersifat kolektif dengan mengadopsi tindakan alih kelola sebelumnya.

Dari uraian di atas, tindakan alih kelola lahan program PHBM yang dilakukan oleh petani anggota LMDH dapat berjalan dengan baik karena masing-masing aktor merasa mendapat keuntungan dari tindakan alih kelola. Hal itulah yang disebut Coleman sebagai norma yang efektif, norma, norma efektif adalah norma yang berasal dari kesepakatan bersama (Coleman, 2011: 333). Kesepakatan bersama dalam konteks alih kelola lahan PHBM ini berupa norma dan kepercayaan yang

dipegang teguh oleh petani pengalih, petani penganti dan anggota LMDH Rimba Makmur pada umumnya untuk menjaga tindakan tersebut tetap berjalan.

Selain petani penggarap yang melakukan tindakan alih kelola lahan PHBM dengan berbagai tujuan, ada pula petani anggota LMDH Rimba Makmur yang tetap mempertahankan lahannya karena mendapatkan manfaat dari pengelolaan lahan yaitu pendapatan nilai ekonomis dari daun cengkeh seperti yang dijelaskan oleh Pak KR sebagai berikut:

Masio ora panen, cengkeh kuwi godonge saiki enak dipangan, regane godong 1 kental podo karo gabah 1 kental. Godong kuwi rata-rata 1 kg regane 4.500, lek di total 1 kental podo karo gabah. Kuwi ben 2 dino teko 4 dino kenek diendangi. Roto-roto ben 2 dino enyang ora mati 80-120 ewu. Jal kuwi lek di etung po ra yo lumayan, paling iso luweh timbang panene cengkehe. Alas kuwi saiki enak di pangan.

(Meskipun tidak panen, cengkeh itu daunnya sekarang bisa dibuat pendapatan, harganya daun cengkeh satu kuwintal sama dengan padi 1 kwintal. Daun itu rata-rata 1 kg harganya 4.500 kalau di total 1 kwintal sama dengan padi itu setiap 2 atau 4 hari bisa di kunjungi. Rata-rata setiap 2 hari didatangi tidak kurang Rp 80.000,00 - Rp. 120.000,00. Coba dihitung apa tidak lumayan? Bisa jadi lebih dari hasil panen cengkehnya. Hutan itu sekarang bisa dibuat sumber pendapatan) (Wawancara 2 Mei 2018).

iyu, opo seng arep di dol, alase meng titik, lek wong-wong ngono kae alase pirang-pirang enggon. Lek tak dol opo seng tak garap?

(Ia apa yang mau dijual, lahannya Cuma sedikit, kalau orang-orang itu lahannya dibberapa tempat. Jika saya jual apa yang saya kerjakan?) (Wawancara pada 2 Mei 2018).

Selain alasan ekonomis dari hasil hutan Pak KR hanya memiliki 2 lokasi lahan dari pemberian orang tuanya seluas 0, 125 Ha. Kedua alasan tersebutlah yang menjadikan Pak KR tetap mempertahankan lahannya.

Munculnya tindakan alih kelola lahan obyek PHBM oleh anggota LMDH Rimba Makmur dapat dilihat sebagai upaya pilihan alternatif dan rasional yang dapat dilakukan oleh anggota sebagai usaha untuk mencapai kepentingannya dengan menggunakan sumber daya lahan obyek PHBM dan uang ganti rugi. Adanya

pendapat orang lain tentang tindakan alih kelola lahan yang dapat menyebabkan petani anggota LMDH tidak dapat mencapai kesejahteraan karena tidak dapat mengelola lahan PHBM, hal tersebut belum tentu kebenarannya. Pendapat rasional dan irasional tentang definisi kesejahteraan menurut individu lain inilah yang disebut Coleman (2011: 21) sebagai tindakan bias sistematis. Bias sistematis berimplikasi pada tindakan individu karena adanya standar obyektif menjadikan tindakan rasional yang dilakukan individu menjadi irasional. Sedangkan jika dilihat dari perspektif subyektif petani LMDH upaya alih kelola merupakan upaya yang paling rasional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan dasar rasional tersebut tindakan alih kelola berlangsung sampai sekarang. Sehingga di sinilah perlunya melihat tindakan dari sudut pandangan pelaku karena pada dasarnya susunan terkecil dari masyarakat adalah individu.

Gambar 5.6 Tagihan *Sharing* buah
Sumber: Dokumentasi pribadi

Tabel. 5.2 Transaksi Alih Kelola Lahan

No	Aktor Pengalih	Sumber Daya	Tujuan	Aktor Pengganti	Sumber Daya	Tujuan	Tahun
1	Muarif	1. Lahan PHBM 2. Pengetahuan 3. Jaringan 4. Modal sosial	Membelikan mobil anaknya	Sutikno	1. Uang 78 Juta 2. Pengetahuan 3. Jaringan	Pekerjaan dan usaha tani	2018
2	Muajir	1. Lahan PHBM 2. Pengetahuan 3. Jaringan	Membangun Rumah	Darmi (luar Desa)	58 juta	-	2018
3	Widodo	1. Lahan PHBM 2. Pengetahuan 3. Jaringan	Investasi dan Persediaan Anakanya Sekolah	Bonijo	1. 75 juta 2. informasi	-	2018
4	Isnadi	Lahan PHBM	Membangun Rumah	Orang Gebyog (luar Desa)	38 juta	-	2014
5	Sukirah	Lahan PHBM	Biaya Anakanya Jadi TKI	Munakib	7 juta	-	2009
6	Sumar	Lahan PHBM	Membangun Ruko Usaha	Samingan	22 juta	-	2018
7	Bawok	Lahan PBM	Pendaftaran TNI anaknya	-	-	-	2012
8	Jumino	Lahan PHBM	Biaya Anakanya Jadi TKI	-	-	-	-
9	Mukaji	2 Lahan PHBM	Biaya masuk kuliah anaknya dan beli mobil	-	180 juta	-	2017
10	-	-	-	Agus	45 juta	-	2013
11	Yoko	Lahan PHBM	Beli Mobil	Orang Domerto (dalam desa)	52 juta	-	2014
12	Samingan	Lahan PHBM	-	Sumar	40 juta	-	2014

Sumber: Data turun lapang peneliti 2018

Pada penelitian ini, terdapat sedikit kekurangan yaitu tentang rasionalitas petani pengganti. Hal tersebut dapat dilihat pada **tabel 5.2** tentang minimnya informan petani pengganti, Rasionalitas Pak Sutikno selaku petani pengganti pada penelitian ini, tidak dapat mewakili atau sebagai generalisir rasionalitas petani pengganti lain yang terlibat alih kelola lahan PHBM. Minimnya informan petani pengganti disebabkan karena informan yang sudah ditentukan dan disiapkan secara *purposive* saat persiapan penelitian, pada saat turun lapang penelitian berada atau bekerja di luar negeri dan di luar pulau. Solusi peneliti untuk mencari informan pengganti sampai saat penelitian ini berakhir tidak menemukan informan petani pengganti lahan obyek PHBM. Dalam penelitian ini informan petani pengganti hanya Pak Sutikno dengan rasionalitas yang sudah di paparkan diparagraf-paragraf sebelumnya dan menurut peneliti rasionalitas Pak Sutikno belum bisa sepenuhnya dibuat generalisir rasionalitas petani pengganti lahan obyek PHBM, meskipun dari hasil observasi sebelumnya rata-rata petani pengganti kelola lahan PHBM beralasan mengganti lahan sebagai sumber penghidupan, sumber pendapatan keluarga, investasi, aset keluarga dan optimisme lahan tidak akan diambil pihak Perhutani, serta cara transaksi alih kelola dengan cara ditawarkan kepada saudara, tetangga, teman, dan orang-orang yang sekiranya membutuhkan lahan dan suka membeli tanah/lahan.

Tindakan alih kelola lahan program PHBM yang dilakukan anggota LMDH Rimba Makmur langsung maupun tidak langsung pasti menghasilkan dampak. Rata-rata informan dalam penelitian ini tidak merasakan dampak negatif dari alih kelola lahan seperti yang disampaikan oleh Pak WD sebagai berikut:

Alah yo podo ae, karek pinter-pinter muterne duwet, lek aku yo pokok duwet kuwi mlaku.

(Alah ya sama saja, tinggal pintar-pintar mutar uangnya, kalau saya asal uang itu jalan) (Wawancara pada 6 Juni 2018).

Pengalih kelolaan lahan tidak berdampak pada perekonomian keluarga selagi uang hasil alih kelola dapat digunakan untuk berinvestasi secara produktif. Sedangkan menurut observasi lapangan ditemukan pengurangan pendapatan dari tindakan alih kelola seperti yang terjadi pada Mbah Sukirah. Mbah Sukirah melakukan alih kelola lahan untuk memberangkatkan anaknya ke Hongkong dengan harapan setelah anaknya bekerja di Hongkong dapat membeli lahan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Namun tidak terjadi seperti yang diharapkan, anak dari Mbah Sukirah yang pulang dari Hongkong gagal membeli lahan karena hasil dari Hongkong hanya bisa dibuat membangun rumah dan gagal mengembalikan hutannya. Kondisi perekonomian keluarga Mbah Sukirah tergolong miskin. Hal tersebut terbukti karena keluarga Mbah Sukirah mendapat bantuan dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari tindakan alih kelola lahan dapat dilihat dari penggunaan hasil alih kelola lahan untuk sektor produktif atau konsumtif.

Selain itu, dari observasi peneliti dampak positif yang timbul dari tindakan alih kelola lahan yaitu meningkatnya status sosial petani pengalih, hal tersebut terjadi pada Pak MJ, Pak MR, Pak Is, Pak WD dan Pak Sumar. Peningkatan status sosial disebabkan karena petani-petani pengalih tersebut memiliki aset berupa mobil maupun rumah yang lebih lebih bagus dari pada masyarakat pada umumnya. Sedangkan dampak negatif yang muncul dari petani pengalih adalah petani pengalih kehilangan aset keluarga dan akses terhadap sumber pendapatan keluarga dari hasil pengelolaan lahan PHBM, tidak dapat dipungkiri hal tersebut berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga. Petani pengalih yang mengalami penurunan tingkat

kesejahteraan yaitu Mbah Sukirah, Pak Tupani, Pak Pair dan Pak Bawok, petani-petani pengalih tersebut mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Penurunan tingkat kesejahteraan terbukti dengan masuknya petani tersebut dalam daftar keluarga miskin penerima bantuan dari negara.

Ada hal yang menarik yang terjadi pada Pak Bawok dan Pak Mukaji, Pak Bawok menjual lahan untuk membangun rumah dan buat bekal anaknya daftar menjadi aparatur negara, meskipun beliau rumahnya bagus dalam masyarakat Pak Bawok tidak mengalami kenaikan status bahkan cenderung dikucilkan karena sekarang bekerja sebagai buruh serabutan. Hampir serupa dengan kondisi yang dialami Pak Mukaji, meskipun Pak Mukaji memiliki mobil pribadi status sosialnya tidak meningkat berbeda dengan yang dialami Pak MR. Hal tersebut terjadi karena Pak Mukaji menjauh dari pergaulan dan cenderung dicemooh oleh masyarakat sekitarnya akibat menjual lahan untuk membeli mobil yang pada dasarnya bukan dari kebutuhannya.

Dari pemaparan di atas, dampak yang dominan muncul adalah dampak negatif akibat penurunan tingkat kesejahteraan keluarga dan status sosial. Tidak heran tindakan alih kelola berdampak negatif karena pada dasarnya lahan yang dialih kelolakan adalah lahan obyek pemberdayaan melalui program PHBM untuk mengatasi kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan lahan program PHBM. Selain itu, tindakan alih kelola lahan PHBM dapat menyebabkan ketimpangan struktur penguasaan lahan karena petani-petani kayalah yang dapat menguasai lahan karena memiliki modal materiil untuk mengganti kepemilikan lahan dan program PHBM berpeluang tidak dapat

mencapai tujuannya yaitu peningkatan kesejahteraan petani miskin sekitar hutan dan kelestarian hutan.

5.3 Alternatif Meminimalisir Alih Kelola Lahan

Tindakan alih kelola lahan yang dilakukan oleh anggota LMDH jika dilihat dari AD/ART tidak semuanya melanggar aturan program PHBM karena yang tertera pada Pasal 15 tentang Anggota, syarat menjadi anggota LMDH Rimba Makmur adalah sebagai berikut:

1. Berdomisili di wilayah Desa pangkuan hutan Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
2. Kehidupannya tergantung pada sumber daya hutan.
3. Memiliki kepedulian terhadap kelestarian sumber daya hutan
4. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan
5. Namanya terdaftar dalam buku daftar anggota perkumpulan.

Dari hasil penelitian ditemukan pelanggaran pada poin 1 dan 5 seperti yang terjadi pada Bu Darmi yang melanggar poin 1 dan 5. Bu Darmi merupakan warga Desa Munjungan bukan warga Desa Tawing dan namanya tidak terdaftar pada buku anggota LMDH. Sedangkan Pak Bonijo melanggar poin 5 karena tidak terdaftar dalam keanggotaan LMDH. Adapun yang terjadi pada Pak Sutikno, Pak Sutikno secara aturan keanggotaan LMDH tidak melanggar karena beliau adalah anggota LMDH Rimba Makmur.

Pada kenyataannya di lapangan peraturan tentang program PHBM tidak tersosialisasikan dengan sempurna dan menjadi landasan dalam pengelolaan lahan PHBM oleh anggota LMDH Rimba Makmur. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak MJ:

Lek wong deso kuwi yu, ora ngerti undang-undang koyo ta AD/ART seng kok omongne kuwi mau. Ngertine iso kerjo nguripi keluargane, lek enek tarikan opo-opo manut seng penting ora ti pateni dalan pangane, kuwi lo lek wong Deso.

(Kalau orang desa itu yu, tidak tau undang-undang seperti AD/ART yang kamu bilang tadi. Ngertinya bisa kerja menghidupi keluarganya. Jika ada iuran apa-apa ya patuh yang penting tidak dimatikan jalan pekerjaannya, itu lo kalau orang Desa itu) (Wawancara pada 20 Mei 2018).

Rata-rata anggota LMDH baru memahami tentang aturan bagi hasil (*sharing*) tanaman yang dipungut setiap musim panen. Selain itu anggota LMDH tidak memahami aturan PHBM karena aturan PHBM tidak ditetapkan secara partisipatif tetapi ditetapkan oleh Perhutani. Tidak heran jika aturan PHBM tidak mengalami proses internalisasi pada diri anggota LMDH.

Sosialisasi hampir tidak pernah dilakukan oleh Perhutani maupun pengurus LMDH kepada anggota LMDH Rimba Makmur. Di sisi lain pengurus LMDH juga mengeluhkan tentang tidak adanya sosialisasi dan sulitnya Perhutani diajak untuk mengadakan sosialisasi tentang kebijakan PHBM kepada anggota LMDH, hal tersebut seperti yang dituturkan oleh bapak B:

Nanging nek mengke Gemiring badhe di Tarik sharing kelopo kulo nyuwong sosialisasi umum. Seluruh sak anggota sak Pokjane ngumpul gen penak Pokjane, lek ora ngono engko dikiro aturane kok pokjane, lek enek sosialisasikan ko Perhutani aturane ngono kae, Pokja karek ngeleksanakane. Lek ora malah seng gelot Pokjane, seng Perhutane penak. Kuwi podo karo ngedu Pokjane karo anggotane, malah tak bendengne, aku ngomong ngene lek ngono kuwi ora dilaksanakne kulo mboten sanggup.

(Nanti jika Gemiring mau ditarik *sharing* kelapa saya minta sosialisasi umum, seluruh anggota dan pokjanya ngumpul supaya enak pokjanya, jika tidak begitu nanti aturanya dikira dari pokja, jika ada sosialisasi dari Perhutani aturanya begitu, pokja tinggal melaksanakannya. Jika tidak yang rusuh malah Pokjanya dan anggotanya, Perhutani enak. Sama saja mengadu Pokja dan anggotanya, saya ngomong begini jika itu tidak dilaksanakan saya tidak sanggup) (wawancara pada 8 Juni 2018)

Setiap ada aturan bagi hasil Perhutani selama ini jarang melakukan sosialisasi langsung kepada anggota LMDH Rimba Makmur. Pihak Perhutani hanya melakukan kunjungan kepada Pokja, salah satunya adalah tentang penarikan bagi hasil tanaman. Bahkan dulu pengurus LMDH mengadakan sosialisasi tentang hasil *sharing* kepada

anggota tanpa bantuan dari Perhutani, tidak lain masalahnya menurut Pak B adalah dana sosialisasi.

Secara langsung maupun tidak langsung, kurang diadakannya sosialisasi oleh Perhutani dan LMDH membuat aturan PHBM tidak dipahami oleh semua anggota LMDH Rimba Makmur. Begitu juga dengan anggota LMDH yang mendapat lahan PHBM dari hasil warisan orang tua atau keluarga atau hasil alih kelola, wajar jika anggota tersebut tidak mengerti tentang aturan dari program PHBM. Inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya alih kelola lahan karena tidak diketahuinya aturan dari PHBM. Sehingga perlu diadakan pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan oleh Perhutani kepada anggota dan pengurus LMDH sampai tujuan dan aturan dari program PHBM dapat dipahami dengan sempurna.

Tidak adanya sanksi atas tindakan alih kelola, membuat tindakan alih kelola menjadi tindakan kolektif di masyarakat. Tindakan kolektif adalah tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan yang menyebabkan keseimbangan kontrol atas beberapa aktor yang berimplikasi pada keseimbangan dalam sistem masyarakat, namun pada kenyataannya perilaku kolektif tidak selalu berimplikasi pada keseimbangan (Coleman, 2011: 271-272). Hal tersebut seperti yang terjadi pada tindakan alih kelola lahan PHBM anggota LMDH Rimba Makmur petani anggota LMDH melihat anggota LMDH yang sebelumnya mengalih kelolakan lahan dan tidak mendapatkan sanksi baik dari Perhutani maupun LMDH.

Tidak diberlakukannya sanksi oleh LMDH Rimba Makmur maupun Perhutani membuat tindakan tersebut berlangsung dengan aman, seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya aktor petani melakukan pembenaran atas tindakan alih kelola lahan PHBM. Pembenaran tindakan alih kelola lahan PHBM yang dilakukan petani

berdampak pada konstruksi pengetahuan di masyarakat yang pada akhirnya bisa sampai menjadi tindakan kolektif di masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Pak MJ, sebagai berikut:

Selama iki ora, aku delok wong-wong yo ora ke.
(Selama ini tidak, saya lihat orang-orang juga tidak) (Wawancara pada 20 Mei 2018).

Tidak adanya tindakan oleh pengurus LMDH bukan tanpa alasan, pengurus LMDH tidak melakukan tindakan karena pertimbangan pengurus yang juga merupakan bagian dari masyarakat Desa Tawing, berikut pernyataan Pak R:

aku dewe ngono iku, arep neng badan hukume. Aku iki urep neng masyarakat. Iyo lek Tawing tak gae ngono, marai yo kuwi maeng, marai ke, yo apiko lek seng menilai perhutani ke ra tak anggep, neng nek neng masyarakat kelek-kelek aku yo ra apik, wong yo abot neng masyarakat.
(Saya sendiri ya seperti itu, mau ke badan hukumnya, saya sendiri hidup di masyarakat. Iya kalau Tawing saya buat begitu, karena ya itu tadi. Karena itu, meskipun baik kalau yang menilai perhutani itu tidak saya anggap, namun jika di masyarakat menderita ya tidak baik, kan ya berat di masyarakatnya) (wawancara pada 26 Juni 2018).

Jika terlalu patuh dengan aturan PHBM bisa jadi pengurus dapat dikucilkan di masyarakat, inilah salah satu alasan kenapa tidak adanya sanksi dalam alih kelola lahan.

Adapun usaha alternatif yang bisa digunakan untuk meminimalisir tindakan alih kelola lahan sebagai berikut:

Pertama adalah pelibatan peran semua anggota LMDH dalam perumusan aturan dalam program PHBM secara partisipatif. Dengan adanya perumusan secara partisipatif anggota dapat berkontribusi secara konsensus dalam perumusan aturan yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi anggota LMDH karena aturan yang baik adalah aturan yang ditetapkan secara sosial dan dipegang oleh sesama anggota lain. Selain itu dengan adanya partisipasi langsung aturan dapat memudahkan

kepentingan semua anggota dari norma yang sudah disepakati dan dilakukan sosialisasi intens. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Coleman (2011: 333) norma/nilai yang baik adalah norma yang ditetapkan secara sosial dan dapat mengontrol tindakan seseorang, serta hak kontrol norma bukan dipegang oleh pelakunya tetapi hak kontrol diberikan kepada orang lain. Selain itu norma yang efektif adalah norma sudah mengalami internalisasi ke dalam diri seseorang atau pelaku yakni pelaku merasakan manfaat dari norma.

Kedua, perilaku kolektif dapat dihentikan ketika dapat mengetahui sebab timbulnya perilaku kolektif (Coleman, 2011). Sebab-sebab timbulnya tindakan alih kelola lahan adalah faktor kebutuhan keluarga dalam jumlah besar dan tidak produktifnya tanaman di lahan PHBM. Untuk masalah produktifitas lahan pertanian banyak anggota LMDH mengharapkan adanya bantuan bibit seperti yang disampaikan oleh Pak Sutikno, sebagai berikut:

Di kei bibit cengkeh ngono ae wes marem, ora muluk-muluk mas.
(Dikasih bibit Cengkeh gitu suda senang, tidak meminta yang tinggi-tinggi mas)
(Wawancara pada 12 Juni 2018).

Bantuan berupa bibit, pupuk dan pembinaan tentang pertanian, perkebunan dan peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan selain mengelola hutan. Dengan produktivitas lahan meningkat maka kebutuhan keluarga dapat terpenuhi tanpa melakukan alih kelola.

Ketiga, perlu didirikan koperasi sebagai badan usaha LMDH Rimba Makmur. Dengan adanya koperasi diharapkan dapat memberikan penambahan pemasukan selain dari hasil sharing. Secara kapasitas sumber daya manusia pengurus LMDH juga pernah mengikuti pelatihan tentang perkoperasian yang dibina oleh Perhutani. Pada pembetakan koperasi dapat melakukan *sharing* modal dengan Pemerintah Desa. Pembentukan unit usaha dapat berdampak pada terwujudnya

LMDH mandiri dan berdampak terdapatnya BumDes bagi Pemerintah Desa Tawing jika kerjasama dalam permodalan.

Keempat, perlu diadakan pemetaan geospasial tentang batas hutan lindung dan hutan produksi. Pada saat ini, semua hutan diwilayah Desa Tawing adalah dikelola sebagai hutan produksi. Berikut pernyataan dari Pak R:

Yo sakjane miturot sak pengalaman kulo, naliko rapat-rapat lingkupe wonten Kediri. Mestine nek wilayah Munjungan niku mestine ngeh hutan lindung, asline ndak kenek ti damel ngoten (produksi). Neng krono wes catune ngoten, perhutani nyadari, kalian duwe kebijakan. Otomatis lek tanduran hutan lindung di ketati, yo modar masyarakate.

(Sebenarnya menurut pengalaman waktu rapat di Kediri (KPH Kediri). Semestinya kalau wilayah Munjungan itu statusnya hutan lindung. Aslinya tidak boleh di buat hutan produksi karena keadaanya sudah begitu perhutani menyadari kondisi tersebut. Otomatis kalau tanaman hutan lindung dibuat ketat maka masyarakatnya bisa mati) (wawancara pada 23 Juni 2018).

Status hutan lindung di Desa Tawing seluas 403,2 ha menurut aturan tidak bisa dibuat hutan produksi, tetapi dengan pengelolaan hutan produksi yang baik seperti melakukan reboisasi, pengelolaan yang berkelanjutan dan tetap menjaga hutan lestari maka status hutan lindung tidak menjadi masalah .

Hal diatas seperti yang disampaikan Pak Sucipto dari LPPM PAMA Trenggalek menyatakan pengelolaan hutan lindung seperti yang dilakukan di hampir seluruh wilayah yang ada di Trenggalek perlu diapresiasi. Dengan model penanaman pohon berbasis kebutuhan masyarakat, penanaman hutan dengan sistem swadaya murni masyarakat melalui tanaman produktif seperti cengkeh, durian, jengkol, pucung, kelapa dapat berfungsi sebagai tanaman hutan lindung. Penempatan masyarakat sebagai subyek inilah yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekologis hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Sucipto, 2016). Maka diperlukan pelibatan masyarakat sebagai subyek dan peningkatan pengetahuan anggota LMDH dalam pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan

PHBM yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Sehingga usaha-usaha di atas perlu dilakukan untuk mewujudkan program PHBM yang sesuai tujuan yang diharapkan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai program PHBM antara Perhutani dan LMDH Rimba Makmur yang pada implementasinya terjadi tindakan alih kelola lahan obyek PHBM yang dilakukan oleh anggota LMDH. Dari penjabaran pada pembahasan sebelumnya mengenai alasan dan terbentuknya pilihan rasional petani anggota LMDH dalam melakukan alih kelola lahan PHBM, maka berikut adalah kesimpulannya:

1. Tindakan alih kelola lahan obyek program PHBM yang dilakukan petani anggota LMDH Rimba Makmur didasari oleh faktor kebutuhan keluarga dan menurunnya produktivitas lahan obyek PHBM. Usaha mengalih kelolakan lahan dilakukan petani karena hasil dari alih kelola lahan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga petani dan alih kelola lahan sebagai usaha untuk menyelamatkan asset keluarga maka petani perlu melakukan alih kelola lahan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan masyarakat lain yang memiliki modal materi berupa uang. Istilah yang dipakai anggota LMDH pada tindakan alih kelola lahan PHBM adalah uang ganti rugi.
2. Pada proses terjadinya alih kelola lahan petani anggota LMDH menggunakan modal lahan, materi berupa uang, informasi dan jaringan yang dimiliki. Selain itu, Alih kelola dilakukan antara petani pengalih dan petani pengganti dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa adanya bukti tertulis, dengan dasar kepercayaan.

4. Dampak dari tindakan alih kelola lahan dalam jangka pendek belum dirasakan secara signifikan oleh keluarga petani anggota LMDH, cenderung dampak positif seperti pemenuhan kebutuhan keluarga dan peningkatan status sosial. Sedangkan dampak alih kelola lahan dalam jangka panjang, menunjukkan kecenderungan berdampak negatif, pasca alih kelola lahan petani mengalami penurunan pendapatan dan tingkat kesejahteraan keluarga, kecuali hasil alih kelola lahan digunakan untuk investasi.

5. Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan anggota LMDH tentang tujuan dan aturan program PHBM membuat tindakan alih kelola lahan terus berlansun karena anggota LMDH mendapatkan lahan tidak hanya dari hasil *babat* (pembukaan lahan) tetapi ada yang dari warisan orang tuanya dan hasil alih kelola. Maka sosialisasi, pendampingan, pembinaan kepada anggota LMDH perlu dilakukan khususnya oleh Perhutani

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Adanya program PHBM seharusnya memberikan dampak lebih, bukan hanya perekonomian semata tetapi pembangunan kapasitas anggota LMDH. Peningkatan kapasitas petani dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan dan pembinaan untuk keberdayaan masyarakat petani. Selain itu, Proses sosialisasi sebagai upaya penyamaan persepsi/kesepahaman anggota LMDH dan Perhutani untuk merangsang adanya partisipasi langsung anggota LMDH pada program PHBM maupun program sejenis seperti Perhutanan Sosial. Peningkatan kapasitas dapat berimplikasi pada peningkatan taraf kesejahteraan keluarga petani. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berkala perlu dilakukan oleh pihak Perhutani, baik kepada pengurus

LMDH maupun anggota LMDH dengan materi tentang pertanian, perkebunan, perkoprasian, pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan materi tentang PHBM. Dalam hal ini, Perhutani dapat bekerja sama dengan Dinas-dinas terkait maupun akademisi.

Pemberian bantuan bibit, penyuluhan, pembinaan baik dari pemerintah daerah maupun Perhutani sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas lahan petani. Sehingga nantinya diharapkan anggota LMDH dapat mandiri secara ekonomi maupun kapasitas sumber daya manusianya dan tidak hanya bergantung pada sumber ekonomi tunggal yaitu pengelolaan lahan PHBM, serta diharapkan dapat terhindar dari tindakan alih kelola.

Untuk LMDH sebaiknya membuat koperasi LMDH dalam bentuk bantuan modal usaha, barang konsumsi, usaha pertanian dan peternakan. Pembuatan badan usaha sebagai upaya mencapai lembaga mandiri dan sebagai upaya untuk memutar uang hasil *sharing* antara LMDH dan Perhutani. Pada pelaksanaannya pembuatan badan usaha dapat *sharing* modal dengan Pemerintah Desa maupun masyarakat. Dengan adanya badan usaha maupun koperasi diharapkan dapat mendapai tingkat LMDH mandiri. Selain itu, perlu pihak-pihak yang berkaitan seperti petani penggarap, LMDH, Perhutani, Pemerintah Desa dan pihak-pihak berkepentingan lainnya perlu melakukan pemetaan geospasial secara partisipatif tentang status dan batas-batas hutan, yakni antara hutan lindung dan hutan produksi di wilayah Desa Tawing. Sehingga tujuan PHBM tentang kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan diharapkan dapat tercapai.

6.2.2 Saran Akademis

Pada penelitian tentang alih kelola lahan obyek PHBM masih banyak kekurangan baik dari segi isi, teori dan kedalaman analisis fenomena yang diteliti. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk bisa menelaah dan menganalisis lebih dalam kasus alih kelola lahan obyek program PHBM di Desa Tawing. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melengkapi kekurangan penelitian ini, baik dari segi teori dan pengembangan masalah. Pada penelitian ini, peneliti belum bisa memperdalam kajian rasionalitas dari pihak petani pengganti karena keterbatasan informasi petani pengganti dan jarak lokasi petani pengganti pada saat penelitian ini berlangsung bekerja di luar pulau dan di luar negeri. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memastikan posisi informan petani pengalih untuk diwawancarai berada pada lokasi penelitian atau peneliti selanjutnya dapat menyiapkan dan memilih petani pengalih sekala lokal dan dapat dipastikan keberadaannya saat penelitian berlangsung. Selain itu, peneliti tidak bisa mendapatkan informasi dan data-data yang mendetail dari pihak Perum Perhutani karena peneliti tidak dapat izin penelitian dari pihak Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang menaungi wilayah Perhutani KPH Kediri. Selain itu, juga peneliti tidak dapat mengikuti proses alih kelola lahan karena terkendala waktu yang tidak tepat dengan momen alih kelola lahan oleh anggota LMDH.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian dengan menggunakan teori selain Pilihan Rasional seperti modal sosial, gender, strategi adaptasi petani dan kajian lainya yang sekiranya dapat menggambarkan secara lebih mendetail tentang tindakan alih kelola lahan obyek PHBM karena hasil penelitian lapangan masih banyak aspek yang perlu dikaji dari alih kelola lahan PHBM dan implementasi program PHBM di lapangan.

DAFTAR PUSATAKA

- Affianto, A. (2005). *Analisis Biaya dan Pendapatan Dalam Pengelolaan PHBM. Sebuah Panduan Perhitungan Bagi Hasil*. Bogor: Pustaka Latin.
- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang, S. A., Widayanti, W. T., Himmah, B., Astiti, A., Septiana, R. M., Solehudin, & Novenanto, A. (2008). *Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. (L. Santoso, W. T. Widayanti, & S. A. Awang, Eds.). Jakarta: Harapan Prima.
- Coleman, J. S. (2011). *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundation of Social Theory)*. Bandung: Nusa Media.
- Dwiyanto, A., & Faturochman. (1998). Validitas Dan Reuabiutas Pengukuran Keluarga Sejahtera. *Jurnal Online Universitas Gajah Mada*, 9(1). Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/viewFile/11710/8668>
- Hairiah, K., Sardjono, M. A., & Sabarnurdin, S. (2003). *Pengantar Agroforestri. Bahan Ajaran*.
- Iskandar, Hartoyo, Sumarwan, U., & Khomsan, A. (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi* (Vol. 11). Medan. Retrieved from [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18931/ikm-des2006-10\(9\).pdf;jsessionid=C4D05609958BE9ED4AE6D3C031C6B9AB?sequence=1](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18931/ikm-des2006-10(9).pdf;jsessionid=C4D05609958BE9ED4AE6D3C031C6B9AB?sequence=1)
- KBBI. (2018a). Arti kata alih - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Retrieved March 22, 2018, from <https://kbbi.web.id/alih>
- KBBI. (2018b). Arti kata kelola - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Retrieved March 22, 2018, from <https://kbbi.web.id/kelola>
- Khususiyah, N. (2013). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Di Das Konto Malang: Pembelajaran Keberhasilan Dan Kegagalan Program. *World Agroforestry Centre (ICRAF)*, 525–530.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2014). Perhutani Bukan untuk Kesejahteraan Rakyat | KPA. Retrieved October 23, 2018, from <http://www.kpa.or.id/news/blog/perhutani-bukan-untuk-kesejahteraan-rakyat/>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2017). Memastikan Jalan Reforma Agraria di Hutan Jawa | KPA. Retrieved October 23, 2018, from

- <https://www.kpa.or.id/news/blog/jadikan-hutan-jawa-sebagai-obyek-reforma-agraria/>
- Kurniawan, N. (2016). Nasib Hutan Munjungan. Retrieved September 29, 2018, from <https://nggalek.co/2016/07/13/nasib-hutan-munjungan/>
- Miles, M. B., Huberman, M. a, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Sage Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudlofar. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kedalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi*. IAIN Sunan Ampel. Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id/10012/>
- Muhaimin. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap*. UIN Sunan Kalijaga. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/11446/>
- Nawawi, M. H. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Desa Tawing. (2015). *Profil Desa/Kelurahan Tahun 2015*. Trenggalek: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BAPEMAS DAN PEMDES) Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- Perhutani. (2017). PHBM. Retrieved December 20, 2017, from <http://www.perhutani.co.id/csr/phbm/>
- pratama, angga. (2016). Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek | signoutnow. Retrieved October 12, 2018, from <https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/18/kecamatan-munjungan-kab-trenggalek/>
- Rachman, N. F. (2012). *Land Reform dari masa ke masa*. Bogor: Sajogyo Institute (SAINS).
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sa'diyah, H., Putri, M. R., Ridarineni, N., & Setiawan, S. D. (2018). Daerah Surplus Beras, Kok Pemerintah Malah Impor Beras? | Republika Online. Retrieved May 31, 2018, from

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/13/p2g7v4415-daerah-surplus-beras-kok-pemerintah-malah-impor-beras>

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada.

Subadi. (2005). *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Madiun.

Sucipto. (2016). Bagaimana Pengelolaan Hutan di Trenggalek? | Suripto | nggalek.co. Retrieved August 21, 2018, from <https://nggalek.co/2016/09/23/bagaimana-pengelolaan-hutan-trenggalek/>

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



LAPIRAN. 1 PANDUAN GUIDE INTERVIEW**Guide Interview****1. Pengalih dan Pengganti****A. Dampak Sosial Ekonomi Pengelolaan lahan**

1. Sejarah pengelolaan Perhutanan sosial
2. Cara mendapatkan lahan
3. Kontribusi lahan terhadap sosial, ekonomi penggarap.
4. Adakah penyulihan dari perhutani, baik bantuan modal, pengetahuan, kredit dsb. (penggarap)

B. Proses Terbentuknya Pilihan Rasional Petani

1. Faktor yang mendorong tindakan alih kelola (ekonomi, sosial, kesempatan. (pengalih/pengganti)
2. Kenapa memilih mengalih kelola atau membeli (pengalih/pengganti)
3. Pertimbangan apa yang membuat anda memilih tindakan tersebut dan adakah pilihan lain (pengalih/pengganti)
4. Apakah anda tidak memiliki asset lebih (pengalih).
5. Makna lahan bagi anda dan kehidupan anda (pengalih/pengganti)
6. Adakah orang lain sebelum anda yang pernah melakukan tindakan tersebut (Perilaku Kolektif) (pengalih/pengganti).
7. Apakah anda mengetahui resiko dari tindakan anda selanjutnya (pengalih/pengganti).
8. Profesi apa yang sekarang anda kerjakan dan lebih baik atau memburuk pasca menjual (pengganti).

C. Proses dalam tindakan alih kelola

1. Bagaimana cara anda melakukan transaksi alih kelola (pengalih/pengganti).
2. Dari mana informasi/jaringan yang anda dapat untuk menjual atau membeli ke aktor lain? (pengalih/pengganti)
3. Adakah aturan dalam konsesi lahan obyek perhutanan sosial, dan apakah anda memahaminya (pengganti)
4. Apakah tidak ada sanksi atau teguran dari perhutani atau sesame masyarakat (pengalih/pengganti)
5. Apakah anda mengetahui dan siap atas resiko dari tindakan alih jelola dari perhutani atau LMDH (pengalih/pengganti)
6. Jika ada sanksi apa yang anda lakukan (pengalih/pengganti)

D. Hasil alih kelola

1. Anda gunakan untuk apa hasil menjual lahan (mengelola produktif, konsumtif, investasi)? (pengganti).
2. Apakah masih tersisa, jika tersisa digunakan untuk apa? (pengganti)
3. Apakah anda mendapat untung dari membeli lahan (pengganti).
4. Memilih membeli lahan digunakan sebagai apa? (investasi atau pekerjaan, dll) (pengganti)

E. Alternatif untuk mengontrol atau meminimalisir alih kelola

1. Apa harapan anda pada PHBM? (pengalih/pengganti)
2. Apakah anda sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan di LMDH? (pengalih/pengganti)
3. Hal apa yang perlu ditingkatkan dan diadakan? (pengalih/pengganti)

2. LMDH dan Perhutani

1. Sejarah pengelolaan hutan.
2. Bagaimana sistem dan tujuan PHBM
3. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan pasca mengelola
4. Komoditas apa yang menjadi tanaman
5. Adakah aturan khusus tentang pengelolaan lahan perhutani.
6. Apakah semua masyarakat memahami peraturan.
7. Dari mana saja anggota LMDH penggarap lahan.
8. Adakah terjadi hak pengelolaan, sebabnya apa?
9. Apakah terjadi tindakan alih kelola lahan oleh masyarakat.
10. Adakah kontrol dari pihak perhutani tentang pengelolaan
11. Adakah sosialisasi dari perhutani tentang SDM dan bantuan modal
12. Jika terjadi alih kelola lahan, upaya apa yang bisa dilakukan oleh LMDH/Perhutani.
13. Kendala apa yang dihadapi LMDH dan Perhutani
14. Adakah bantuan yang diberikan perhutani/ LMDH kepada petani penggarap.
15. Bagaimana keuntungan perhutani pasca ada PHBM

3. Petani yang tidak menjual lahan.

1. Peran lahan konsesi perhutani terhadap keluarga
2. Bagaimana sejarah pengelolaan lahan
3. Bagaimana anda mendapatkan lahan tersebut,

4. Adakah kesepakatan dan aturan dalam mengelola lahan konsesi ini dan apakah anda memahaminya.
5. Dampak sosial ekonomi
6. Apakah terjadi alih kelola
7. Jika ada orang yang melanggar aturan atau melakukan jual beli apakah ada teguran.
8. Apakah anda tidak ingin melakukan jual beli lahan dengan harga yang ada.
9. Selain dari hutan adakah pekerjaan utama atau sampingan lain.
10. Adakah asset selain hutan, dan apakah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
11. Masalah apa yang di hadapi penggarap dalam mengelola lahan?
12. Harapan dan saran anda dalam pengelolaan ini?

